



# **PERUBAHAN RENSTRA**

## **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

### **2016 - 2021**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**



# **BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 maka dipandang perlu untuk melakukan Perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021;
  - b. bahwa terkait dengan hasil evaluasi indikator keberhasilan visi yang disebut “21 perairan” sebagaimana tertera dalam pasal 5 ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 bahwa terdapat beberapa indikator, yang bukan merupakan indikator kinerja daerah dan tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk melakukan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Provinsi Daerah Sumatera Utara Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 39);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 132);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 137);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016-2021

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:



1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
3. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perubahan RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang telah melalui proses perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang telah disesuaikan dengan Perubahan RPJMD.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagaimana yang terdapat dalam Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

#### Pasal 3

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 16 Juli 2019

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 16 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



HADI WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2019  
NOMOR : 26

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI**

**NOMOR : 26 TAHUN 2019**

**TANGGAL : 16 Juli 2019**

**TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
TAHUN 2016-2021**

**Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Tahun 2016-2021  
Kabupaten Serdang Bedagai**

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021		target	Rp (juta)	
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
MISI I: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat pada umumnya dan aparaturnya melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan cinta terhadap daerah serta menumbuhkan kehidupan berbudaya dan bermartabat																		
	Tujuan-1: Meningkatkan kualitas SDM masyarakat	IPM	68,01	68,23		68,69		69,14		69,59		70,5		70,5		70,5		
	Sasaran 1.1: Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	1. Rata-Rata Nilai USBN SD	NA	71,99		77,3		77,5		78		78,5		80		80		Disdik
		2. Rata-Rata Nilai UN SMP	NA	51,79		48,06		53		55		60		62		62		Disdik
		3. Angka Rata- rata Lama Sekolah (tahun)	8,08	8,34		8,35		8,45		8,58		8,71		8,81		8,81		Disdik
		4. Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,31	12,54		12,55		12,7		12,8		12,9		13		13		Disdik
1.	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD yang terakreditasi	3,80%	6,70%	1.973	13,09%	2.201	15,00%	2.898	20,00%	3.161	25,00%	3.351	30,00%	3.518	30,00%	3.518	Disdik
		Persentase desa yang memiliki PAUD	NA	75,30%		81,00%		82,00%		83,00%		84,00%		85,00%		85,00%		Disdik
2.	Program Wajib Belajar 9 Tahun				18.257		14.113		23.741		27.641		31.061		34.575			Disdik
		Angka Putus Sekolah SD sederajat	0,03%	0,31%		0,03%		0,01%		0,01%		0,00%		0,00%		0,00%		Disdik
		Persentase siswa SD miskin dan tidak mampu yang mendapat beasiswa	25,64%	30,00%		32,70%		35,00%		40,00%		45,00%		50,00%		50,00%		Disdik
		Persentase meubiler SD dalam kondisi baik	NA	40,00%		64,00%		70,00%		75,00%		80,00%		85,00%		85,00%		Disdik
		Persentase ruang kelas SD dalam kondisi baik	86,34%	85,49%		85,30%		90,36%		92,00%		94,00%		95,00%		95,00%		Disdik

Kod e	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Angka Putus Sekolah SMP	0,15%	0,15%		0,05%		0,03%		0,02%		0,01%		0,00%		0,00%		Disdik
		Persentase ruang kelas SMP dalam kondisi baik	80,76%	83,28%		83,28%		83,98%		84,80%		85,00%		85,50%		85,50%		Disdik
		Persentase meubiler SMP dalam kondisi baik	NA	60,00%		65,00%		67,00%		70,00%		72,00%		75,00%		75,00%		Disdik
		Persentase siswa SMP/MTs miskin dan tidak mampu yang mendapat beasiswa	27,51%	35,00%		33,70%		35,00%		37,00%		40,00%		50,00%		50,00%		Disdik
		Persentase sekolah SMP yang menerapkan materi keterampilan berdasarkan kearifan lokal/budaya local	20,00%	20%		22,00%		24,00%		26,00%		28,00%		30,00%		30,00%		Disdik
3	Program Pendidikan non-formal	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal terakreditasi	3,61%	12,12%	536	23,63%	345	24,00%	295	24,20%	388	24,70%	408	25,00%	424	25,00%		Disdik
4	Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Guru yang berijazah S1/D4	88,00%	90,00%	154.073	92,00%	196	94,00%	932	96,00%	1.516	98,00%	1.592	100,00%	1.671	100,00%		Disdik
		Persentase guru yang telah mengikuti Pelatihan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)	35.50%	35,00%		37.50%		39.50%		41.50%		45,50%		50,00%		50,00%		Disdik
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase komite sekolah yang memiliki program kerja tahunan	NA	NA	656	37.50%	987	39.50%	915	41.50%	1.763	43.50%	1.834	45.50%	1.907	45.50%	1.907	Disdik
		Persentase sekolah yang melaksanakan kegiatan kepramukaan secara rutin	NA	60,00%		70,00%		75,00%		80,00%		85,00%		90,00%		90,00%		Disdik

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
6	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100,00%	100%	2.824	100,00%	3.423	100,00%	3.292	100,00%	3.353	100,00%	3.379	100,00%	3.379	100,00%	3.379	Disdik
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100,00%	100%	946	100,00%	964	100,00%	290	100,00%	261	100,00%	287	100,00%	316	100,00%	316	Disdik
8	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur	-	-	-	100,00%	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdik
9	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100,00%	100,00%	-	100,00%	39	100,00%	55	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	Disdik
10	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	47,05%	47,05%	-	48,00%	-	49,00%	-	49,00%	609	50,00%	615	50,00%	615	50,00%	615	Disdik
11	Program Pendidikan Menengah				12.121													Disdik
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				221													Disdik
12	Program Pengembangan Budaya (Minat) Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase jumlah anggota perpustakaan (Jumlah anggota perpustakaan/penduduk usia potensial baca {5 s.d 60 tahun})	NA	NA	221	NA	0	0,16%	280	0,25%	158	0,33%	350	0,41%	450	0,41%	450	Dispersusi p
	Sasaran 1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	105/100000	61/100000		69/100000		95/100000		90/100000		85/100000		80/100000		80/100000		Dinkes
		2. Angka Kematian Bayi (AKB)	6/1.000	6/1.000		6/1.000		5/1.000		5/1.000		4/1.000		4/1.000		4/1.000		Dinkes
		3. Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	67,47	67,63		67,79		68,6		69,63		70,68		71,38		71,38		Dinkes



Kod e	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase fasilitasi kesehatan sesuai standar permenkes	20,00%	25,00%	10.645	35,00%	11.310	40,00%	10.560	42,00%	45.000	45,00%	47.000	47,00%	50.000	47,00%	50.000	Dinkes
2	Program Upaya kesehatan masyarakat	Cakupan penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	52,30%	50,00%	39.421	60,00%	44.319	75,00%	54.151	95,00%	32.947	100,00%	35.000	100,00%	37.000	100,00%	37.000	Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	NA	NA		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	NA	NA		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		Dinkes
3	Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	62,50%	62,50%	0	100,00%	0	100,00%	54	100,00%	149	100,00%	274	100,00%	330	100,00%	330	Dinkes
4	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	persentase sekolah yang mempromosikan kesehatan	NA	25,00%	22	28,00%	54	31,00%	297	33,00%	461	38,00%	432	41,00%	500	41,00%	500	Dinkes
		Cakupan Desa Siaga Aktif	23,00%	70,00%		75,00%		80,00%		85,00%		90,00%		100,00%		100,00%		Dinkes
		Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	34,00%	35,00%		36,00%		37,00%		38,00%		39,00%		40,00%		40,00%		Dinkes
5	Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	87,10%	85,00%	68.5	100,00%	142.6	100,00%	160	100,00%	180	100,00%	401.3	100,00%	720.5	100,00%	720,5	Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	94,40%	93,90%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	89,80%	86,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		Dinkes
6	Program Perbaikan gizi masyarakat	Prevalensi stunting	NA	28,50%		31,60%	44	28,00%	110	27,80%	447	27,50%	824	27,20%	1.000	27,20%	1.000	Dinkes
		Prevalensi Gizi Kurang	NA	6,4		6,2		6		5,8		5,7		5,6		5,6		Dinkes

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7	Program Obat dan perbekalan kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	90,00%	91,00%	7.088	92,00%	7.294	93,00%	7.869	94,00%	8.000	95,00%	8.518	100,00%	10.438	100,00%	10.438	Dinkes
8	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase industri rumah tangga yang memiliki IPIRT (Izin Produksi Industri Rumah Tangga)	42,00%	50,00%		55,00%	29	65,00%	70	75,00%	394	85,00%	432	100,00%	469	100,00%	469	Dinkes
9	Program Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Dampak Asap Rokok	Persentase kawasan yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok	NA	10,00%		10,00%	100	20,00%	700	25,00%	140	30,00%	490	35,00%	830	35,00%	830	Dinkes
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka Keberhasilan Pengobatan TB BTA + atau Success Rate	80,70%	90,00%	803	90,00%	426	90,00%	614	90,00%	702	90,00%	1.259	90,00%	1.500	90,00%	1.500	Dinkes
		Cakupan Case Detection Rate (CDR) TB Paru	NA	70,00%		70,00%		70,00%		70,00%		75,00%		75,00%		75,00%		Dinkes
		Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	NA	10,00%		20,00%		30,00%		40,00%		45,00%		50,00%		50,00%		Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	NA	NA		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		Dinkes
11	Program Pengembangan lingkungan sehat	Persentase Rumah Tangga yang memiliki air bersih yang memenuhi syarat kesehatan	62,00%	64,00%	131	66,00%	47	68,00%	91	68,00%	325	69,00%	649	69,00%	754	69,00%	754	Dinkes
		Persentase penduduk yang stop buang air besar sembarangan	NA	58,00%		68,00%		75,00%		85,00%		95,00%		100,00%		100,00%		Dinkes
12	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita	NA	NA		100,00%	28	100,00%	75	100,00%	72	100,00%	142	100,00%	150	100,00%	150	Dinkes
13	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase puskesmas yang terakreditasi	0,00%	0,00%		30,00%	917	65,00%	2.563	100,00%	3.140	100,00%	3.350	100,00%	3.650	100,00%	3.650	Dinkes

Kod e	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
14	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Persentase perempuan usia 30-50 tahun dideteksi dini kanker serviks dan payudara	0,00%	15,00%	0	25,00%	0	35,00%	65	40,00%	531	45,00%	855	50,00%	1.083	50,00%	1.083	Dinkes
		Cakupan pelayanan penderita hipertensi	-	-	-	-	-	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		Dinkes
		Cakupan pelayanan penderita diabetes militus	-	-	-	-	-	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat	-	-	-	-	-	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		Dinkes
15	Pelayanan Administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100,00%	100,00%	1.317	100,00%	2.215	100,00%	1.889	100,00%	1.989	100,00%	2.584	100,00%	2.987	100,00%	2.987	Dinkes
16	Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75,00%	78,00%	475	83,00%	452	88,00%	1.970	93,00%	1.414	98,00%	1.560	100,00%	1.780	100,00%	1.780	Dinkes
17	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100,00%	100,00%	118	100,00%	50	100,00%	436	-	-	-	-	100,00%	25	100,00%	25	Dinkes
18	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA	10,00%	128	12,00%	109	15,00%	559	20,00%	584	25,00%	664	30,00%	674	30,00%	674	Dinkes
19	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				8,5													Dinkes
20	Program Peningkatan Kesehatan Dasar				272													Dinkes
21	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan						35											Dinkes
22	Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	NA	75,00%	5	90,00%	26	90,00%	61	90,00%	23							RSUD

Kod e	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
23	Program Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase jumlah fasilitas kesehatan sesuai dengan standar RS Kelas C	60,00%	50,00%	9.225	75,00%	20.044	75,00%	14.022	80,00%	2.422	85,00%	10.450	90,00%	11.650	90,00%		RSUD
24	Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit	Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik	60,00%	65,00%	1.549	70,00%	87	75,00%	1.635	80,00%	427	85,00%	2.000	90,00%	2.000	90,00%		RSUD
25	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Akreditasi Rumah Sakit	NA			dasar	400	Pratama	570	Pratama	152	Pratama	300	Paripurna	300			RSUD
		Angka Bed of Rate (BOR) Rumah	29,50%	31,00%		57,00%		60,00%		63,00%		65,00%		67,00%			RSUD	
		Angka Long of Stay (LOS) Rumah Sakit	4 hari	5 hari		5 hari		5 hari		5 hari		5 hari		5 hari			RSUD	
26	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100,00%	100,00%	1.586	100,00%	11.222	100,00%	10.267	100,00%	11.174	100,00%	12.000	100,00%	12.300	100,00%	12.300	RSUD
27	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	70,00%	70,00%	1.075	80,00%	183	100,00%	335	100,00%	691	100,00%	600	100,00%	700	100,00%	700	RSUD
28	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100,00%	100,00%	15	100,00%	5	100,00%	3					100,00%	15	100,00%	15	RSUD
29	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA	81,6%	64	75,92%	102	94,00%	255	96,00%	530	98,00%	250	100,00%	235	100,00%	235	RSUD
30	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				9		31		122									RSUD
31	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Ranperda	NA	NA	-	-	-	2	150	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0			RSUD
32	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	5,21%	5,21%	314	5,23%	288	5,25%	356	5,30%	312	5,32%	866	5,34%	1.111	5,34%	1.111	DP2KBP3A
		Jumlah OPD yang menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	36	38		40		44		46		46		46		46		DP2KBP3A

Kod e	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
33	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	11,00%	11,00%	42	11,50%	41	11,53%	36	11,55%	55	11,57%	126	11,57%	156	11,57%	156	DP2KBP3A
34	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Desa Layak Anak	3	3	169	3	165	3	136	3	142	3	453	3	559	3	559	DP2KBP3A
35	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang ditangani	100,00%	100,00%	73	100,00%	172	100,00%	56	100,00%	119	100,00%	921	100,00%	1.037	100,00%	1.037	DP2KBP3A
36	Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB aktif	73,64%	73,84%	1.962	74,04%	2.030	74,23%	6.619	74,43%	6.726	74,64%	15.346	74,84%	18.602	74,84%	18.602	DP2KBP3A
37	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB / KR Yang Mandiri	Jumlah peserta KB baru	12.305	12.305	235	12.472	95	13.096	107	13.750	113	14.438	608	15.160	734	15.160	734	DP2KBP3A
38	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Jumlah PIK remaja yang aktif	60	60	13	65	46	70	56	76	57	80	177	83	213	83	213	DP2KBP3A
39	Program Pengembangan Model Operasional BKB – Posyandu – PADU	Persentase bina keluarga lansia (BKL) yang aktif	66,60%	66,60%	58	68,40%	-	69,77%	-	71,16%	-	72,59%	110	74,04%	120	74,04%	120	DP2KBP3A
40	Program Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Persentase bina keluarga balita (BKB) yang aktif	67,50%	67,82%	21	68,95%	-	70,27%	-	71,60%	103	72,97%	348	74,36%	449	74,36%	449	DP2KBP3A
		Persentase bina keluarga remaja (BKR) yang aktif	67,30%	67,40%		67,56%		68,85%		70,16%		71,50%		72,86%		72,86%		DP2KBP3A
41	Program Pelayanan Kontrasepsi	Tingkat Penurunan TFR (total fertility rate)	2,90%	2,90%	136	2,89%	37	2,85%	37	2,70%	31	2,68%	166	2,65%	180	2,65%	180	DP2KBP3A
42	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100,00%	100,00%	532	100,00%	700	100,00%	521	100,00%	447	100,00%	675	100,00%	878	100,00%	878	DP2KBP3A
43	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	122	100,00%	45	100,00%	285	100,00%	265	100,00%	403	100,00%	524	100,00%	524	DP2KBP3A



Kod e	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggun gi jawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
44	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 laporan)	100,00%	100,00%	25	100,00%	15	100,00%	13		-		-	100,00%	15	100,00%	15	DP2KBP3A
45	Program Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	Persentase cabang olah raga yang dibina	NA	50,00%	655	60,00%	841	65,00%	1.515	70,00%	975	75,00%	1.200	80,00%	1.350	80,00%	1.350	Disporapar bud
46	Program Peningkatan sarana dan prasarana olah raga	Persentase cabang olah raga yang memiliki gedung olahraga/ sarana olahraga	NA	10,00%	464	20,00%	397	30,00%	550	40,00%	552	50,00%	1.000	60,00%	1.200	60,00%	1.200	Disporapar bud
47	Program Peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase cakupan organisasi pemuda yang mendapat peran dalam event kabupaten	NA	20,00%	40	40,00%	446	60,00%	679	75,00%	1.007	80,00%	1.130	100,00%	1.250	100,00%	1.250	Disporapar bud
	Sasaran 1.3: Meningkatnya konsumsi masyarakat	Pengeluaran konsumsi Rumah Tangga Per-Kapita (Ribu Rp)	26.025,92	27.277,73		28.481,40		29.684,70		30.888,10		31.091,50		32.295,19		32.295,19		
1	Program Pengendalian Inflasi Daerah	Persentase capaian inflasi daerah	100,00%	100,00%	462	100,00%	830	100,00%	477	100,00%	216	100,00%	550	100,00%	650	100,00%		Sekretariat Daerah
	Tujuan-2: Penyelenggaraan good governance	Indeks Reformasi Birokrasi	56	58		60		62		65		68		70		70		
	Sasaran 2.1: Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WDP	WDP		WDP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
1	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penetapan Perda APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	3.415	Tepat Waktu	1.876	Tepat Waktu	4.449	Tepat Waktu	3.590	Tepat Waktu	3.600	Tepat Waktu	3.700	Tepat Waktu		BPKA
2	Program Peningkatan pengelolaan barang daerah	Persentase kesesuaian database terkait total nilai BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	100,00%	100,00%	618	100,00%	167	100,00%	483	100,00%	373	100,00%	400	100%	450	100%		BPKA

Kod e	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3	Program Penertiban, Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Pemerintah	Persentase tanah milik Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang bersertifikat	45,67%	56,44%	315	67,21%	313	77,97%	321	88,74%	396	100,00%	400	100%	450	100%		BPKA
4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	NA	NA	70.000	NA	60	NA	381	100,00%	0	100,00%	10	100,00%	10	100,00%		BPKA
5	Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase ketersediaan dokumen kinerja pelayanan kedinasan (laporan)																BPKA
6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Peningkatan Teknologi Informasi dalam rangka pelayanan (bulan)		12	50	12	20	12	10	12	10							BPKA
7	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100,00%	100,00%	5.674	100,00%	2.911	100,00%	2.518	100,00%	2.011	100,00%	2.050	100%	2.100	100%	2.100	BPKA
8	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	2.966	100,00%	463	100,00%	706	100,00%	871	100,00%	800	100%	750	100%	750	BPKA
9	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai SAP	100,00%	100,00%	474	100,00%	154	100,00%	904	100,00%	135	100,00%	150	100%	200	100%	200	BPKA
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA	91,00%	220	92,00%	20	93,00%	94	94,00%	92	95,00%	100	96%	100	96%	100	BPKA
11	Program Pengembangan Informasi dan media massa	Penerapan teknologi informasi dalam rangka pelayanan publik (paket)		1	70													BPKA

Kod e	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
12	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur melalui absensi online (paket)		1	210													BPKA
13	Program Penataan Perundang-Undangan	Penataan perundangan-undangan barang milik daerah	-	-	-	100%	150	-	-	-	-	-	-	-	-			BPKA
14	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase obrik yang tidak memiliki temuan yang bersifat material	NA	65,00%	2.670	75,00%	2.235	80,00%	1.868	90,00%	2.050	95,00%	2.964	100,00%	3.321	100,00%		Inspektorat
		Persentase obrik yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan internal		20		26		65		75		90		100		100		Inspektorat
		Persentase obrik yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal		62		64		80		90		95		100		100		Inspektorat
		Persentase kasus yang ditindaklanjuti		100		100		100		100		100		100		100		Inspektorat
15	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase ketersediaan pedoman dan dokumen kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	NA	47	14	66	1	85	100	90	6	95	8	100	6	100		Inspektorat
16	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Akuntabilitas	Persentase perangkat daerah yang memiliki perencanaan dan akuntabilitas baik	NA	NA	53	67	18	85	74	95	118	100	165	100	199	100		Inspektorat
17	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100,00%	100,00%	382	100,00%	308	100,00%	387	100,00%	447	100,00%	490	100,00%	538	100,00%	538	Inspektorat

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggun jawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
18	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	65,00%	60,00%	769	65,00%	301	75,00%	195	85,00%	290	95,00%	340	100,00%	435	100,00%	435	Inspektorat
19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase SDM APIP yang memiliki standar kompetensi	66,00%	47,00%	531	66,00%	295	75,00%	244	85,00%	263	95,00%	526	100,00%	538	100,00%	538	Inspektorat
20	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan dokumen laporan kinerja dan keuangan (10 laporan)	100,00%	100,00%	34	100,00%	6	-	-	-	-	-	-	100,00%	7	100,00%	7	Inspektorat
21	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Reformasi Birokrasi	Persentase perangkat daerah yang telah mengimplementasikan SPIP	0,00%	-	-	-	-	50,00%	124	75,00%	225	95,00%	282	100,00%	447	100,00%		Inspektorat
22	Program Penyusunan Kebijakan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang telah mengikuti pembinaan dan pelatihan SPIP	0,00%	-	-	-	-	50,00%	125	-	-	-	-	-	-			Inspektorat
23	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase realisasi anggaran sesuai rencana arus kas	70,00%	80,00%	464	85,00%	829	90,00%	393	95,00%	241	100,00%	400	100,00%	450	100,00%	450	Setdakap
24	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD yang menyampaikan laporan fisik kegiatan yang baik dan tepat waktu	37,50%	100,00%	128	100,00%	192	100,00%	122	100,00%	99	100,00%	125	100,00%	150	100,00%	150	Setdakap
	Sasaran 2.2: Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Serdang Bedagai	C	CC		B		B		B		BB		BB		BB		
1	Program Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Persentase OPD yang melaporkan Dokumen Kinerja tepat waktu	70,00%	80,00%	163	85,00%	515	90,00%	223	95,00%	524	100,00%	550	100,00%	550	100,00%		Setdakab
		Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	C	CC		B		B		B		BB		BB		BB		Setdakab
2	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Nilai LPPD	2,5018	2,57	1.474	2,623	1.469	2,793	787	2,953	675	3,05	800	3,21	850	3,21	850	Setdakab

Kod e	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggun jawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan dokumen laporan kinerja dan keuangan (10 laporan)																Inspektorat , Bappeda, Semua OPD
4	Pengembangan Data/ Informasi	Tingkat Integrasi data OPD ke dalam Serdang Bedagai satu data	NA	NA	202	20,00%	612	80,00%	430	85%	617	90%	650	100%	750	100%	750	Bappeda
		Persentase capaian kinerja DAK/TP	NA	85,00%		90,00%		90,00%		95%		95%		100%		100%		Bappeda
5	Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan kabupaten terhadap dokumen perencanaan OPD:	NA		785		755		1.407		1.019		1.100		1.200		1.200	Bappeda
		RPJMD dengan	NA	86,00%		88,00%		90,00%		92%		94%		96%		96%		Bappeda
		RPJMD dengan RKPD	84%	86,00%		88,00%		90,00%		92%		94%		96%		96%		Bappeda
		RKPD dengan Renja	NA	86,00%		88,00%		90,00%		92%		94%		96%		96%		Bappeda
		Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodir dalam	NA	85,00%		87,00%		89,00%		90%		94%		94%		94%		Bappeda
6	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase hasil kajian bidang ekonomi yang diterapkan	NA	100,00%	211	100,00%	169	100,00%	112	100%	142	100%	300	100%	350	100%	350	Bappeda
7	Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Persentase hasil kajian bidang sosial budaya/SDM yang diterapkan	NA	100,00%	437	100,00%	518	100,00%	440	100%	478	100%	550	100%	600	100%	600	Bappeda
8	Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase hasil kajian bidang prasarana wilayah yang diterapkan	NA	100,00%	332	100,00%	651	100,00%	541	100%	1.121	100%	950	100%	950	100%	950	Bappeda
9	Penataan Ruang	Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang	NA	25,00%	160	35,00%	119	45,00%	1.011									Bappeda
10	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100,00%	708	100,00%	1.047	100,00%	803	100%	520	100%	950	100%	1.050	100%	1.050	Bappeda



Kod e	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
11	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100,00%	194	100,00%	192	100,00%	339	100%	828	100%	900	100%	780	100%	780	Bappeda
12	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA	90,00%	14	91,00%	75	92,00%	181	93%	53	94%	100	95%	100	95%	100	Bappeda
	Sasaran2.3: Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	73,96	75		77		78		78,5		79		80		80		
1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	73,96	75	-	77	-	78	369.500	78,5	293.494	79	350.000	80	400.000	80		Setdakab
2	Program Penguatan Reformasi Birokrasi Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	56	58	-	60	187	62	40	65	92	68	100	70	150	70		Setdakap
3	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase OPD yang ditata kelembagaan dan ketatalaksanaan	NA	10,00%	99	20,00%	140	30,00%	344	50,00%	390	75,00%	350	100,00%	400	100,00%		Setdakap
		Persentase OPD yang menerapkan SOP dan SPP	70,00%	80,00%		85,00%		90,00%		95,00%		100,00%		100,00%		100,00%		Setdakap
4	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Jumlah tanda batas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai	25 tanda batas	2 tanda batas	250	2 tanda batas	693	2 tanda batas	-	2 tanda batas	100	2 tanda batas	-	2 tanda batas	-	2 tanda batas	-	Setdakap
5	Program Perlombaan Lembaga Pemerintahan	Persentase kecamatan yang mengikuti perlombaan kecamatan terbaik	100,00%	100,00%	402	100,00%	500	100,00%	350	100,00%	366	100,00%	375	100,00%	400	100,00%	400	Setdakap
6	Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklnajuti menjadi MoU setiap tahun	50,00%	50,00%	180	60,00%	103	70,00%	-	80,00%	108	90,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	Setdakap
7	Program Penataan Perundang-Undangan	Jumlah produk hukum yang difasilitasi setiap tahun:			100		150		267		277		350		400		400	Setdakap
		Perda yang ditetapkan	133	8		11		11		12		12		12		12		Setdakap
		Perda yang diundangkan	133	8		11		11		12		12		12		12		Setdakap

Kod e	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggun giawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Peraturan Bupati	270	20		20		20		20		20		20		20		Setdakap
		Keputusan Bupati	2281	400		400		400		400		400		400		400		Setdakap
8	Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum	Persentase jumlah kasus-kasus yang difasilitasi	100,00%	100,00%	100	100,00%	150	100,00%	530	100,00%	280	100,00%	550	100,00%	600	100,00%	600	Setdakap
9	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui e- procurement	100,00%	100,00%	2.420	100,00%	2.500	100,00%	1.702	100,00%	1.790	100,00%	1.800	100,00%	1.900	100,00%	1.900	Setdakap
		Persentase kegiatan yang dilelang sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP)	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		Setdakap
10	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	Persentase pengusaha yang paham tentang peraturan jasa konstruksi	100,00%	100,00%	362	100,00%	49	100,00%	30	100,00%	295	100,00%	30	100,00%	35	100,00%	35	Setdakap
11	Program Hari-Hari Besar Keagamaan	Persentase fasilitasi aktifitas keagamaan di masyarakat umum	NA	80,00%	2.509	80,00%	3.652	80,00%	1.450	80,00%	2.098	80,00%	1.450	80,00%	1.500	80,00%	1.500	Setdakap
12	Program Peningkatan Pemahaman Keagamaan	Jumlah aliran sesat	0	0	4.697	0	4.056	0	3.885	0	4.590	0	3.800	0	3.900	0	3.900	Setdakap
13	Program Peningkatan Hubungan Silaturahmi	Persentase kegiatan hari besar keagamaan tingkat kabupaten yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten	80,00%	80,00%	3.043	80,00%	3.147	80,00%	1.679	80,00%	2.953	80,00%	1.700	80,00%	1.800	80,00%	1.800	Setdakap
14	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase usulan Hibah dan Bansos yang difasilitasi	100,00%	100,00%	-	100,00%	110	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	Setdakap
15	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100,00%	100,00%	28.967	100,00%	28.988	100,00%	32.962	100,00%	29.006	100,00%	33.000	100,00%	33.500	100,00%	33.500	Setdakap

Kod e	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
16	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	8.372	100,00%	10.555	100,00%	8.031	100,00%	8.900	100,00%	8.100	100,00%	8.200	100,00%	8.200	Setdakap
17	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100,00%	100,00%	396	100,00%	410	100,00%	304	100,00%	255	100,00%	350	100,00%	400	100,00%	400	Setdakap
18	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA	91,00%	6.105	92,00%	929	93,00%	1.199	94,00%	1.043	95,00%	1.000	96,00%	1.100	96,00%	1.100	Setdakap
19	Program Perbaikan Sisitem Administrasi Kearsipan	Jumlah arsip yang sudah diolah tahun n di Depo Arsip Daerah	NA	75 berkas		75 berkas	1.1	500 berkas	45	600 berkas	78,84	650 berkas	250	700 berkas	300	700 berkas	300	Disperpusi p
20	Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah	Persentase OPD yang arsip bakunya disimpan di Depo Arsip Daerah	NA	2,94%		9,26%	19	50,00%	31,56	55,00%	20	60,00%	300	65,00%	350	65,00%	350	Disperpusi p
21	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	NA	NA		3,00%	21,76	5,00%	50	10,00%	71	15,00%	100	20,00%	150	20,00%	150	Disperpusi p
22	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	60,00%	65,00%	1.557	73,96%	3.249	75,00%	3.486	80,00%	3.385	85,00%	2.000	90%	2.000	90%	2.000	Disdukcapil
		Persentase penerbitan KTP-el	NA	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100%		100%		Disdukcapil
		Persentase penerbitan kartu keluarga	NA	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100%		100%		Disdukcapil
		Persentase penerbitan Akte Kelahiran anak usia 0-18 tahun	NA	65,00%		72,00%		75,00%		78,00%		82,00%		85%		85%		Disdukcapil
		Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	-		-		-		25,00%		35,00%		50%		50%		Disdukcapil

Kod e	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase validasi dan kemutahiran database kependudukan	-	-		-		-		75,00%		80,00%		85%		85%		Disdukcapil
23	Program Penataan Perundang-Undangan	Jumlah Perda tentang adminduk						100,00%	75									Disdukcapil
24	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100,00%	100,00%	823	100,00%	539	100,00%	639	100,00%	560	100,00%	1.573	100%	1.732	100%	1.732	Disdukcapil
25	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang tersedia	100,00%	100,00%	274	100,00%	231	100,00%	821	100,00%	786	100,00%	1.307	100%	1.565	100%	1.565	Disdukcapil
26	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100,00%	100,00%	20	-	-	100,00%	20	-	-	-	-	100,00%	15	100,00%	15	Disdukcapil
27	Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan melalui aplikasi IT	NA	0,00%	0	0,00%	0	60,00%	1.003	75,00%	3.791	90,00%	3.800	100,00%	4.000	100,00%	4.000	Diskominfo
		Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,00%	20,00%	3237000	40,00%	4130000	70,00%	5.495	90,00%	21.595	100,00%	8.765	1000,00%	8.765	1000,00%	8.765	Diskominfo
28	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Persentase informasi pembangunan yang terpublikasi	100,00%	100,00%	1.555.312	100,00%	1.454.910	100,00%	1.435	100,00%	2.109	100,00%	2.000	100,00%	2.297	100,00%	2.297	Diskominfo
29	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Persentase Layanan Informasi Pembangunan yang terpublikasi	NA	100,00%	0	100,00%		100,00%	155	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	Diskominfo
30	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Publikasi melalui petunjuk dan Media Cetak	100,00%	100,00%	1.089.597	100,00%	963.090	100,00%	440	100,00%	544	100,00%	642	100,00%	706	100,00%	706	Diskominfo
		Persentase Layanan Informasi dan komunikasi publik yang terpublikasi	100,00%	100,00%	1.177.547	100,00%	1.786.620	100,00%	1.869	100,00%	2.024	100,00%	2.119	100,00%	2.239	100,00%	2.239	Diskominfo

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
31	Program Perlombaan Kehumasan	Persentase minat masyarakat ikut perlombaan	NA	0,00%	0	0,00%	0	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	Diskominfo
32	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi	NA	0,00%	0	100,00%	3.420.649	70,00%	276	90,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	Diskominfo
33	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Aplikasi OPD berbasis web yang terintegrasi	NA	0,00%	0	0,00%		100,00%	155	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	Diskominfo
34	Program Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan Telekomunikasi	Persentase menara telekomunikasi dan radio siaran yang terdata	NA	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%	98	100,00%	110	100,00%	121	100,00%	121	Diskominfo
35	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pencapaian standart pelayanan prima administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	322	100,00%	813	100,00%	3.149	100,00%	902	100,00%	1.035	100,00%	1.139	100,00%	1.139	Diskominfo
36	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90,00%	90,00%	182	90,00%	447	95,00%	305	95,00%	322	95,00%	250	95,00%	335	95,00%	335	Diskominfo
37	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100,00%	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	15	100,00%	15	Diskominfo
38	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase Peningkatan SDM Bidang Kominfo yang memiliki kompetensi	84,00%	78,00%	269	100,00%	579	100,00%	652	100,00%	170	100,00%	150	100,00%	150	100,00%	150	Diskominfo
39	Program Peningkatan PAD	Persentase capaian target PAD perizinan						100,00%	119	100,00%	102	100,00%	55	100,00%	75	100,00%	75	DPMP2TSP
40	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah data arsip yang tersimpan di Depo Arsip	NA	NA	-	75 berkas	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disperpusi p
41	Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah	Persentase OPD yang arsip bakunya disimpan di Depo Arsip Daerah	NA	2,94%	-	9,26%	19	50,00%	32	55,00%	20	60,00%	300	65,00%	350	65,00%	350	Disperpusi p



Kod e	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021		target	Rp (juta)	
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
42	Program Perbaikan Sisitem Administrasi Kearsipan	Jumlah arsip yang sudah diolah tahun n di Depo Arsip Daerah	NA	75 berkas		75 berkas	1 500 berkas	45	600 berkas	79	650 berkas	250	700 berkas	300	700 berkas	300	Disperpusi p	
43	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	NA	NA		3,00%	22	5,00%	50	10,00%	71	15,00%	100	20,00%	150	20,00%	150	Disperpusi p
44	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100,00%	100,00%	408	100,00%	585	100,00%	676	100,00%	651	100,00%	900	100,00%	950	100,00%	950	Disperpusi p
45	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	99,00%	99,10%	437	99,20%	213	99,30%	326	99,40%	629	99,50%	750	99,60%	835	99,60%	835	Disperpusi p
46	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100,00%	-	-	-	-	100,00%	20	-	-	-	-	-	-	-	-	Disperpusi p
47	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA	NA	-	NA	-	16,66%	22	33,00%	20	50,00%	75	66,66%	75	66,66%	75	Disperpusi p
48	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Dokumen LPPD	NA	4 dok	75	1 dok	12	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0%	-	0%	-	BAPENDA
49	Program Peningkatan PAD	Persentase realisasi PAD terhadap pendapatan	6,30%	7,54%	1.933	7,48%	2.021	13,59%	3.290	8,03%	3.190	9,09%	3.535	10,00%	3.620	10,00%	3.620	BAPENDA
50	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	100%	100,00%	35	100,00%	100	100,00%	55	100,00%	175	100,00%	112	100,00%	305	100,00%	305	BAPENDA
51	Program Peningkatan/ Pembinaan Sadar Pajak	Persentase wajib pajak yang taat membayar pajak	55,51%	57,15%	-	59,88%	-	64,58%	410	71,04%	580	78,15%	740	85,97%	780	85,97%	780	BAPENDA
52	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100,00%	100,00%	3.128	100,00%	1.531	100,00%	2.090	100,00%	2.029	100,00%	2.097	100,00%	2.172	100,00%	2.172	BAPENDA
53	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	2.836	100,00%	1.133	100,00%	575	100,00%	713	100,00%	720	100,00%	850	100,00%	850	BAPENDA

Kod e	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
54	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100,00%	100,00%	83	100,00%	95	100,00%	140	100,00%	110	100,00%	125	100,00%	140	100,00%	140	BAPENDA
55	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA	10,00%	27	10,00%	-	10,00%	25	10,00%	50	30,00%	180	10,00%	60	10,00%	60	BAPENDA
56	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	59,17%	80,00%	535	83,00%	887	92,00%	945	93,00%	1.826	94,00%	2.035	95,00%	1.965	95,00%	1.965	BKD
57	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Persentase Adm Kenaikan Pangkat yang tepat waktu	NA	75,00%	20	78,00%	36	80,00%	69	81,00%	144	82,00%	410	83,00%	510	83,00%	510	BKD
		Persentase Administrasi Gaji Berkala yang tepat waktu	NA	NA		95,00%		90,00%		91,00%		92,00%		93,00%		93,00%		BKD
		Persentase Administrasi Pensiun yang tepat waktu	NA	NA		98,00%		95,00%		97,00%		98,00%		98,00%		98,00%		BKD
58	Program Peningkatan Kualitas Data dan Informasi	Persentase data ASN yang sesuai Surat Edaran Kepala BKN No. 11 Tahun 2012	NA	20,00%	127	80,00%	51	85,00%	79	87,00%	165	90,00%	410	95,00%	310	95,00%	310	BKD
59	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran ASN	NA	NA	339	85%	242	96%	220	97%	310	98%	260	98%	378	98%	378	BKD
		Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN	NA	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		BKD
		Persentase OPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin	NA	NA		89,00%		90,00%		91,00%		92,00%		93,00%		93,00%		BKD
60	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100,00%	100,00%	757	100,00%	844	100%	942	100,00%	1.034	100,00%	1.101	100,00%	1.212	100,00%	1.212	BKD
61	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	460	100,00%	275	100,00%	665	100,00%	732	100,00%	805	100,00%	885	100,00%	885	BKD

Kod e	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
62	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi AKIP OPD	C	CC	17	CC	19	B	15	B	-	BB	-	BB	-	BB	-	BKD
63	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi Manajerial	NA	15,00%	1.967	13,00%	1.364	25,00%	1.814	27,00%	6.786	29,00%	6.748	30,00%	7.453	30,00%	7.453	BKD
		Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi Teknis	NA	60,15%		65,00%		65,00%		66,00%		67,00%		68,00%		68,00%		BKD
		Meningkatnya tingkat pendidikan PNS/ASN		75,00%		75,00%		75,00%		80,00%		85,00%		95,00%		95,00%		BKD
64	Program Peningkatan kapasitas lembaga DPRD	Persentase Penguatan Dan Peningkatan Kualitas/Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	NA	100,00%	19.807	100,00%	26.660	100,00%	27.866	100,00%	28.305	100,00%	28.700	100,00%	29.850	100,00%	29.850	Sekwan
65	Program peningkatan hubungan silaturahmi	Persentase fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan/ kegiatan silaturahmi	NA	100,00%	130	100,00%	130	100,00%	137	100,00%	152	100,00%	150	100,00%	200	100,00%	200	Sekwan
66	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100,00%	100,00%	1.724	100,00%	1.942	100,00%	1.971	100,00%	2.103	100,00%	2.100	100,00%	2.180	100,00%	2.180	Sekwan
67	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100,00%	100,00%	9	100,00%	34	100,00%	47					100,00%	20	100,00%	20	Sekwan
68	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	1.962	100,00%	3.119	100,00%	2.293	100,00%	1.798	100,00%	1.800	100,00%	1.800	100,00%	1.800	Sekwan
69	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	100,00%	100,00%	449	100,00%	458	100,00%	695	100,00%	910	100,00%	640	100,00%	650	100,00%	650	Sekwan

Kod e	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
70	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA	30,00%	156	35,00%	113	65,00%	205	75,00%	206	80,00%	250	85,00%	300	85,00%	300	Sekwan
71	Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam	Persentase desa tangguh bencana	14,00%	14,00%		14,00%	80	14,00%	100	15,00%	134	16,00%	150	17,00%	175	17,00%	175	BPBD
		Rasio peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	NA	NA	-	50,00%	444	60,00%	134	70,00%	534	80,00%	550	90,00%	600	90,00%	600	BPBD
72	Program Perbaikan perumahan akibat bencana alam/Sosial	Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi yang tertangani	0	0	398	0	201	1	369	1	171	1	200	2	250	2	250	BPBD
73	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan pencegahan bencana	Persentase cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan penanganan bencana alam	NA	53,00%	104	59,00%	222	65,00%	230	71,00%	41	76,00%	150	82,00%	200	82,00%	200	BPBD
		Tingkat waktu tanggap darurat (Response Time Rate) kejadian bencana	NA	NA		NA		NA		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		BPBD
73	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100,00%	100,00%	763	100,00%	1.090	100,00%	1.043	100,00%	1.149	100,00%	1.296	100,00%	1.335	100,00%	1.335	BPBD
74	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	78,26%	78,26%	102	78,26%	60	79,59%	135	80,49%	120	80,77%	178	81,00%	200	81,00%	200	BPBD
75	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan pegawai	NA		-		-		-		-	98%	100		100		100	BPBD
76	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 laporan)	NA		40		3	50,00%	33	60,00%	-	70,00%	-	100,00%	15	100,00%	15	BPBD

Kod e	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggun giawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
77	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA	NA	30	40,00%	-	50,00%	72	65,00%	64	85,00%	75	100,00%	100	100,00%	100	BPBD
MISI II : Meningkatkan investasi dan daya saing daerah melalui pemberdayaan sumber daya lokal dan penciptaan energi terbarukan																		
	Tujuan-3: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05	5,14		5,16		5,2		5,25		5,28		5,3		5,3		
	Sasaran 3.1: Meningkatnya investasi	Nilai Investasi (Triliun Rupiah)	1,91 Triliun	0,04 Triliun		0,10 Triliun		0,50 Triliun		0,15 Triliun		0,15 Triliun		0,1 Triliun		3 Triliun		DPMP2TSP
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase kenaikan jumlah investor	NA	NA	222	5,08%	208	1,53%	258	1,56%	678	1,58%	730	1,60%	850	1,60%		DPMP2TSP
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase perusahaan yang melaporkan LPKM	NA	60,00%	14	70,00%		100,00%	76	100,00%		100,00%	40	100,00%	40	100,00%		DPMP2TSP
3	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Rata-rata lama proses perizinan (hari)	14	14		7	186,25	5		5		5		5		5		DPMP2TSP
4	Program Optimalisasi Pemanfaatan Informasi Pelayanan Perizinan	Persentase layanan izin sesuai waktu	NA	NA	30	92,00%	71	95,00%	126	95,00%	147	95,00%	209	95,00%	250	95,00%		DPMP2TSP
5	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan	Persentase pengaduan yang diselesaikan/ ditindaklanjuti	NA	NA	186	100,00%	229	100,00%	73	100,00%	215	100,00%	250	100,00%	322	100,00%		DPMP2TSP
6	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100,00%	100,00%	742	100,00%	784	100,00%	662	100,00%	969	100,00%	1.026	100,00%	1.056	100,00%	1.056	DPMP2TSP
7	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	135	100,00%	149	100,00%	76	100,00%	536	100,00%	600	100,00%	335	100,00%	335	DPMP2TSP
8	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100,00%	100,00%	6	100,00%	15	100,00%	15					100,00%	15	100,00%	15	DPMP2TSP



Kod e	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA				-			94,00%	25	95,00%	100	96,00%	75	96,00%	75	DPMP2TSP
10	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistim Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perselisihan perusahaan dengan tenaga kerja yang diselesaikan	100,00%	100,00%	417	100,00%	240	100,00%	262	100,00%	515	100,00%	750	100,00%	850	100,00%		Disnakerko p&UM
11	Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha mikro kecil Menengah	Jumlah wirausaha baru (orang)	NA	10	257	508	87	282	192	500	123	800	250	900	300	3000		Disnakerko p&UM
12	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	persentase perselisihan perusahaan dengan tenaga kerja yang diselesaikan	NA			100,00%	120											Disnakerko p&UM
13	Program Investasi dan Promosi Daerah	Jumlah jenis produk IKM yang dipromosikan ke luar daerah	8	22	202	22	898	37	995	37	1.026	37	1.100	37	1.150	37		Disperinda g
14	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan penyelesaian penegakan Perda	65,00%	70,00%	1.041	100,00%	891	100,00%	1.032	100,00%	1.202	100,00%	1.315	100,00%	1.315	100,00%	1.315	Satpol PP
15	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	45,00%	60,00%	2.787	70,00%	2.966	80,00%	3.272	90,00%	3.528	100,00%	3.506	100,00%	3.506	100,00%	3.506	Satpol PP
16	Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran	100,00%	100,00%	-	100,00%	41	100,00%	41	100,00%	41	100,00%	41	100,00%	41	100,00%	41	Satpol PP
17	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Cakupan penyelesaian penegakan Perda	NA	0	-	0	-	0	-	0	-	100,00%	304	0	-	0	-	Satpol PP
18	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan	NA	NA		NA		NA		1,41	21	2,85	23	2,85	23	2,85	23	Satpol PP

Kod e	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggun gijawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
19	Program Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Rasio peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	100,00	100,00		100	723	100	773	100	825	100	825	100	925	100	925	Satpol PP
20	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100,00%	100,00%	367	100,00%	443	100,00%	499	100,00%	480	100,00%	338	100,00%	328	100,00%	328	Satpol PP
21	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100,00%	100,00%	29	100,00%	24	100,00%	6					-	-	-	-	Satpol PP
22	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	752	100,00%	1.740	100,00%	1.695	100,00%	1.141	100,00%	1.772	100,00%	2.630	100,00%	2.630	Satpol PP
23	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA	100,00%	174	100,00%	701	100,00%	322	100,00%	158	100,00%	276	100,00%	306	100,00%	306	Satpol PP
24	Program Peningkatan pelayanan angkutan	Persentase penurunan kecelakaan	NA	10%	2.309	19%	2.391	10%	1.731	20%	1.539	20%	1.250	20%	1.500	20%	1.500	Dishub
25	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase titik kemacetan yang teratasi	NA	NA	677	100,00%	69	100,00%	181	100,00%	367	100%	500	100%	500	100%	500	Dishub
26	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Persentase fasilitas prasarana LLAJ dalam kondisi baik	14,29%	28,57%	20	28,57%	-	60,00%	35	60,00%	45	70%	50	70%	50	70%	50	Dishub
27	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	46,40%	56,55%	150	72,02%	275	70,00%	340	70,00%	42	80%	500	80	600	80	600	Dishub
28	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100,00%	100,00%	628	100,00%	5	100,00%	474	100,00%	575	100%	625	100%	625	100%	625	Dishub

Kod e	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
29	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100,00%	100,00%	35	100,00%	8	100,00%	8	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	Dishub
30	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	669	100,00%	372	100,00%	352	100,00%	592	100%	800	100%	1.000	100%	1.000	Dishub
31	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA	90,00%	10	91,00%	20	92,00%	25	93,00%	25	94%	30	95%	30	95%	30	Dishub
32	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100,00%		44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Dishub
33	Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Peningkatan Penyebaran Informasi Potensi Kabupaten	NA	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%	150	100,00%	200	100,00%	200	Diskominfo
34	Program Peningkatan Peran Supra dan Infra Struktur Politik	Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu	NA	14,45%	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kesbangpol
35	Program Pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase potensi konflik yang terselesaikan	65,00%	100,00%	566	100,00%	324	100,00%	1.415	100,00%	1.630	100,00%	1.750	100,00%	1.950	100,00%	1.950	Kesbangpol
36	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah kasus radikalisme	NA	0	563	0	303	0	520	0	580	0	1.065	0	1.145	0	1.145	Kesbangpol
37	Program kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah konflik suku	0	0	-	0	65	0	545	0	595	0	630	0	665	0	665	Kesbangpol
38	Program Peningkatan kelembagaan masyarakat	Jumlah konflik agama	NA	0	167	0	102	0	515	0	572	0	592	0	650	0	650	Kesbangpol
39	Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Jumlah kasus narkoba yang ditangani	NA	-	-	22	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kesbangpol

Kod e	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggun g jawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
40	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu					28		787		902		975		740		740	Kesbangpol
		- Pilgub	NA	-	-	-	-	60,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kesbangpol
		- Pileg	0%	-	-	-	-	-	-	62,00%	-	-	-	-	-	-	-	Kesbangpol
		- Pilpres	0%	-	-	-	-	-	-	62,00%	-	-	-	-	-	-	-	Kesbangpol
		- Pilkada	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	63,00%	-	-	-	-	-	Kesbangpol
41	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Jumlah konflik sosial yang disebabkan oleh penyakit masyarakat	NA	0	80	-	-	0	770	0	810	0	845	0	890	0	890	Kesbangpol
42	Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Perda yang ditetapkan	NA	0	-	1	132	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kesbangpol
43	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100,00%	100,00%	408	100,00%	381	100,00%	619	100,00%	972	100,00%	1.019	100,00%	804	100,00%	804	Kesbangpol
44	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100,00%	100,00%		100,00%	38	100,00%	670	100,00%	390	100,00%	390	100,00%	370	100,00%	370	Kesbangpol
45	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100,00%	100,00%	6	100,00%	15	100,00%	31	-	-	-	-	100,00%	15	100,00%	15	Kesbangpol
	Sasaran 3.2: Meningkatnya kontribusi sektor unggulan	Persentase kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDRB	41,42%	39,43%		39,10%		39,10%		39,30%		39,50%		40,00%		40,00%		Distan, DKP
		Persentase kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB	19,36%	19,36%		19,60%		19,50%		19,70%		19,80%		20,00%		20,00%		Disperinda g

Kod e	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase kontribusi sektor Jasa Lainnya (pariwisata) pada PDRB	0,53%	0,29%	4.195	0,43%	6.070	0,65%	6.510	0,75%		0,85%		1,00%		1,00%		Disporapar bud
1	Program Peningkatan produksi pertanian	Produksi (ton)			510		766		771		1.280		2.672		3.152			Distan
Padi		408.381	428.748		480.708		446.880		454.480		463.600		471,2		471,2		Distan	
Jagung		15.872	18.109		21.126		10.723		11.007		11.269		11,553		11,553		Distan	
Ubi Kayu		532.873	501.479		364.088		514.523		517.842		521.128		524,427		524,427		Distan	
2	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Jumlah pameran yang diikuti	4	5	69	5	76	6	198	5	195	5	200	5	100	5	100	Distan
3	Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian	Jumlah teknologi yang dapat diadopsi	4	4	1.074	4	428	5	609	6	1.586	7	2.255	7	3.156	7		Distan
Peningkatan produktivitas padi dan palawija :																		
Padi (ton/ha)		5,62	5,67		5,72		5,88		5,98		6,1		6,2		6,2		Distan	
Jagung (ton/ha)		4,61	4,65		4,9		4,91		5,04		5,16		5,29		5,29		Distan	
Ubi Kayu (ton/ha)		39,6	39,92		40,47		40,52		40,78		41,04		41,3		41,3		Distan	
4	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Hortikultura	Peningkatan produksi :			127		429		498		401		1.685		1.707			Distan
Sayur-Sayuran (ton)		3752	6.756		9.223		9.453		9.642		9.835		10.032		10.032		Distan	
Buah-Buahan (ton)		73.466	62.001		44.784		45.698		47.775		48.492		49.219		49.219		Distan	
Tanaman Obat		NA	2,45		9,75		9,99		10,19		10,39		10,6		10,6		Distan	
5	Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Air	Luas baku lahan sawah yang terairi irigasi (ha)	33.556	33.005	7.273	32.779	4.054	36.168	4.749	36.168	4.452	36.168	5.000	36.168	5.504	36.168		Distan
6	Program pengembangan prasarana dan sarana lahan/jalan	panjang jalan pertanian yang dibangun (km)	61 km	4 km	4.015	7,5 km	2.600	7,5 km	4.225	7,5 km	5.505	7,5 km	6.410	7,5 km	7.150	7,5 km		Distan
		Luas cetak sawah baru (ha)	0	1	-	51		62		75		85		100		100		Distan
7	Program Peningkatan Agrobisnis Perkebunan	Persentase peningkatan nilai tambah tanaman perkebunan	10	10%	-	10,00%	85	10,00%	319	10,00%	505	10,00%	1.464	10,00%	1.402	10,00%		Distan

Kod e	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
8	Program peningkatan produksi dan produktifitas tanaman perkebunan	Produksi (ton)			550.406		2.509		797		500		1.344		2.014			Distan
		kelapa sawit	1.131.014	1107150,9		1190240,8		1.201.375		1.224.829		1.248.283		1.271.736		1.271.736		Distan
		karet	37.762,90	39.693,80		39549,1		41,876		42,248		43,619		44,897		44,897		Distan
		kakao	971,51	1.022,29		1.143,11		1.125,00		1.176,00		1.194,00		1.211,00		1.211,00		Distan
		kelapa	2321,27	2506,45		3127,98		2,475		2,493		2,495		2,499		2,499		Distan
		Produktifitas (kg/ha)																Distan
		kelapa sawit	14651,92	14.635,87		14.709,47		14.765,71		14.800,00		14.950,85		15.133,35		15.133,35		Distan
		karet	978,42	1.181,55		1.187,61		1.015,10		1.026,63		1.031,01		1.050,18		1.050,18		Distan
		kakao	826,04	868,78		956,96		986,02		1.017,94		1.069,95		1.102,56		1.102,56		Distan
		kelapa	1144,38	1.237,91		1.529,99		1.183,00		1.216,01		1.234,83		1.299,10		1.299,10		Distan
9	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase penyuluh yang dibina	NA	30,00%	1.616	40,00%	211	100,00%	478	100,00%	296	100,00%	523	100,00%	1.053	100,00%		Distan
10	Program Peningkatan SDM Penyuluh Pertanian dan Kelembagaan Pertanian	Persentase kelompok tani yang difasilitasi	NA	60,00%	975	65,00%	482	70,00%	552	80,00%	455	90,00%	943	100,00%	1.094	100,00%		Distan
11	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100,00%	100,00%	843	100%	1.309	100,00%	1.054	100,00%	1.339	100,00%	1.119	100,00%	1.171	100,00%	1.171	Distan
12	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	269	100,00%	596	100,00%	717	100,00%	1.245	100,00%	617	100,00%	670	100,00%	670	Distan
13	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100,00%	100,00%	20	100,00%	14	100,00%	176	-	-	-	-	100,00%	25	100,00%	25	Distan
14	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA	91,00%	90	92,00%	20	93,00%	20	93,00%	20	94,00%	65	95,00%	70	95,00%	70	Distan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
15	Program Peningkatan Kelembagaan Irigasi Partisipatif	Persentase kelompok P3A yang mampu mengelola irigasi secara partisipatif	0,00%	5,00%	154	5,00%	199	82,00%	0	0	0	0	0	0	0			Distan
16	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase penanganan/pencegahan penyakit utama hewan	NA	100,00%	247	100,00%	169	100,00%	403	-	-	-	-	-	-			Distan
17	Program Peningkatan produksi hasil peternakan	Produksi daging (ton)	1.715	1.715	322	1.732	294	1.749	315									Distan
18	Program Peningkatan penerapan teknologi peternakan	Peningkatan hasil kelahiran IB (ekor)	7.965	8067	567	8147	402	8,228	1.053									Distan
19	Program Penjaminan Pangan Asal Hewan Yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)	Jumlah temuan pangan asal hewan yang tidak ASUH	-	0	96	50	66	40	36									Distan
20	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase penanganan/pencegahan penyakit utama hewan	NA	100,00%	246	100,00%	168	100,00%	403	100,00%	466	100,00%	832	100,00%	1.032	100,00%		Disketapan g
21	Program Peningkatan produksi hasil peternakan	Produksi daging (ton)	1.715	1.715	321	1.732	293	1.749	314	1.767	41	1.775	560	1.785	759	1.785		Disketapan g
22	Program Peningkatan penerapan teknologi peternakan	Peningkatan hasil kelahiran IB (ekor)	7.965	8067	566	8147	402	8,228	1.052	8.310	2.245	8.393	1.619	8.476	1.852	8.476		Disketapan g
23	Program Penjaminan Pangan Asal Hewan Yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)	Jumlah temuan pangan asal hewan yang tidak ASUH	-	0	95	50	65	40	36	30	74.440	20	525	10	550	10		Disketapan g
24	Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Ketersediaan pangan utama:			390		675		687		618		800		1.000		1.000	Disketapan g
		- Energi (kkal/kapita/hari)	3.060	3.062		3.067		3.070		3.080		3.100		3.105		3.105		Disketapan g
		- Protein (gr/kapita/hari)	77,59	77,61		77,68		77,82		77,88		79,00		80,00		80,00		Disketapan g
25	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100,00%	100,00%	831	100,00%	776	100,00%	594	100,00%	900	100,00%	1.000	100,00%	1.200	100,00%	1.200	Disketapan g

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
26	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100,00%	100,00%	35	100,00%	25	100,00%	20	-	-	-	-	100,00%	15	100,00%	15	Disketapan g
27	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	180	100,00%	90	100,00%	45	100,00%	417	100,00%	410	100,00%	436	100,00%	436	Disketapan g
28	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA	-	-	-	-	100,00%	15	100,00%	25	100,00%	25	100,00%	50	100,00%	50	Disketapan g
29	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase penyuluh yang difasilitasi	NA	30,00%	1.617	40,00%	211	50,00%	479	-	-	-	-	-	-	-	-	Disketapan g
30	Program Peningkatan SDM Penyuluh Pertanian dan Kelembagaan Pertanian	Persentase kelompok tani yang difasilitasi	NA	60,00%	976	65,00%	482	70,00%	553	-	-	-	-	-	-	-	-	Disketapan g
31	Program Pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya (ton)	27,258	30.731	4.421	37.853	1.718	37,915	2.969	41.707	3.971	45.878	4.325	50.465	5.055	50.465	-	DKP
32	Program Pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	25,363	25.567	742	23.122	394	26295	4.056	26.600	2.936	26.909	2.890	27.232	3.370	27.232	-	DKP
33	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Volume produksi pengolahan hasil perikanan (ton)	3,349	1.845	611	2.145,60	344	2408	293	2.444	530	2.493	724	2.555	720	2.555	-	DKP
34	Program pengembangan SDM dan kelembagaan Perikanan	Persentase kelompok perikanan dan kelautan yang direvitalisasi	NA	NA	0	5	63	10	28	15	272	20	321	25	355	25	355	DKP
35	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100,00%	100,00%	735	100,00%	646,37	100,00%	994	100,00%	1.150,00	100,00%	1.620	100,00%	1.675	100,00%	1.675	DKP
36	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	156	100,00%	190	100,00%	203	100,00%	245,00	100,00%	295	100,00%	340	100,00%	340	DKP



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
37	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 laporan)	100,00%	100,00%	181	100,00%	118	100,00%	130	-	-	-	-	-	-	-	-	DKP
38	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA	0	-	0	-	0	-	37,00%	82,58	60,00%	200	70,00%	200	70,00%	200	DKP
39	Program pengawasan sumber daya perikanan	Cakupan bina kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)	4,00%	4,00%	191	4,00%	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKP
		Persentase Kepatuhan (Compliance) Unit Usaha Budidaya terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	30,00%	39,00%		39,00%		-		-		-		-				DKP
		Persentase Kepatuhan (Compliance) Unit Usaha Pengolahan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	25,00%	42,00%		42,00%		-		-		-		-				DKP
40	Program Peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah IKM yang meningkat penggunaan teknologinya	NA	NA	-	-	-	-	-	2	86	20	350	15	500	15		Disperindag
41	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah Pertumbuhan Sentra IKM	2	2	-	3	-	4	39	5	253	5	350	5	550	5		Disperindag
42	Program Pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru hasil pembinaan langsung (IKM)	NA	100	215	100	268	100	308	200	812	150	669	150	683	150	683	Disperindag

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
43	Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	15,32%	15,43%	279	15,54%	393	15,65%	372	15,76%	288	15,87%	600	15,98	650			Disperindag
44	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase perlindungan terhadap konsumen	100,00%	100,00%	892	100,00%	553	100,00%	659	100,00%	867	100,00%	870	100%	875			Disperindag
45	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Persentase Jumlah Pedagang Kaki Lima yang difasilitasi	5,00%	5,00%	-	10,00%	100	20,00%	77	-	-	20,00%	350	25%	400			Disperindag
46	Program Pembangunan infrastruktur perdesaan	Jumlah pasar yang dibangun	1	0	1.790	2	2.007	1	450	1	1.010	1	8.000	1	7.000			Disperindag
47	Program Peningkatan Kapasitas IKM	Persentase jumlah peningkatan kualitas IKM	100,00%	100,00%	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Disperindag
48	Program Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	Tersedianya sumur bor air bersih	NA	1	150													Disperindag
49	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Persentase Peningkatan IKM	NA	2,00%	300													Disperindag
50	Program penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah perda yang ditetapkan				1	150	1	75	1	75	1	75	1	75			Disperindag
51	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100,00%	100,00%	1.318	100,00%	1.140	100,00%	1.504	100,00%	1.195	100,00%	1.250	100%	1.450			Disperindag
52	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	214	100,00%	337	100,00%	480	100,00%	470	100,00%	500	100%	650			Disperindag
53	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 laporan)	100,00%	100,00%	24	100,00%	10	100,00%	25	-				-	-			Disperindag

Kod e	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggun jawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
54	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA	-	-	11,00%	30			18,00%	32	21,00%	100	25%	125			Disperinda g
55	Program Pengembangan pemasaran pariwisata	jumlah ragam media promosi pariwisata (buah)	NA	1	135	2	703	3	420	4	919	5	1.000	6	1.200	6	1.200	Disporapar bud
56	Program Pengembangan destinasi pariwisata	persentase fasilitas peningkatan dan pengembangan destinasi wisata	NA	20,00%	120	40,00%	963	60%	530	80,00%	912	90,00%	1.000	100,00%	1.200	100,00%	1.200	Disporapar bud
57	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Pariwisata	Jumlah kegiatan ekonomi kreatif pariwisata yang dilaksanakan	NA	NA	NA	NA	NA	2	100	3	312	4	450	5	650	5	650	Disporapar bud
58	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase nilai budaya yang dikembangkan	NA	NA	-	NA	-	20%	496	40%	395	60%	1.000	80%	1.500	80%	1.500	Disporapar bud
59	Program penngelolaan keragaman budaya	Persentase seni budaya yang diselenggarakan dalam bentuk festival/ pagelaran	NA	20,00%	376	40,00%	819	60,00%	749	75,00%	1.326	80,00%	1.450	100,00%	1.500	100,00%	1.500	Disporapar bud
60	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase benda, situs, cagar budaya yang dilestarikan	NA	NA	100	NA	365	4,00%	235	8,00%	258	12,00%	450	16,00%	550	16,00%	550	Disporapar bud
61	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100,00%	100,00%	1.017	100,00%	787	100,00%	766	100,00%	899	100,00%	1.000	100,00%	1.200	100,00%	1.200	Disporapar bud
62	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90,76%	90,76%	469	91,61%	549	92,00%	289	93,00%	241	94,00%	300	95,00%	330	95,00%	330	Disporapar bud
63	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	NA	NA	-	100,00%	25	100,00%	25	NA		100,00%	-	100,00%	20	100,00%	20	Disporapar bud

Kod e	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggun jawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
64	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peraturan daerah sebagai produk perundangundang an daerah yang terbentuk	NA	NA		NA		1 perda	75	NA		NA		NA		NA		Disporapar bud
65	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA	100%	3		-	50,00%	45	60,00%		70%	100	80,00%	100	80,00%	100	Disporapar bud
MISI III : Mewujudkan masyarakat yang berjiwa wirausaha dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mengembangkan berbagai produk unggulan daerah yang berorientasi pasar guna mempercepat penanggulangan kemiskinan																		
	Tujuan-4: Menurunkan pengangguran	TPT	7,18%	NA		7,18%		7,00%		6,80%		6,50%		6,35%		6,35%		
	Sasaran 4.1: Meningkatnya kesempatan kerja	Jumlah wirausaha baru (orang)	250	10		508		282		500		800		900		3000		Disnakerko p&UM
		Terciptanya tenaga kerja terlatih (orang)	NA	25		433		432		1.000		1.000		1.110		4000		Disnakerko p&UM
1	Program peningkatan kualitas dan produktivitas SDM tenaga kerja	Terciptanya tenaga kerja yang terlatih (orang)	NA	25	541	433	1.071	432	1.100	1000	1.200	1000	1.300	1110	1.400	4000		Disnakerko p&UM
2	Program Penempatan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	Pencari kerja yang mengurus AK I/Kartu Kuning (orang)	NA	673	53	1305	59	1200	125	1300	200	1400	350	1500	400	1500		Disnakerko p&UM
3	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistim Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perselisihan perusahaan dengan tenaga kerja yang diselesaikan	100,00%	100,00%	417	100,00%	240	100,00%	262	100,00%	515	100,00%	750	100,00%	850	100,00%		Disnakerko p&UM
4	Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha mikro kecil Menengah	Jumlah wirausaha baru (orang)	NA	10	257	508	87	282	192	500	123	800	250	900	300	3000		Disnakerko p&UM
5	Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Pembentukan dan revitalisasi koperasi	NA	3	195	1	172	6	250	6	300	6	450	8	510	8		Disnakerko p&UM
6	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pembentukan dan revitalisasi koperasi	NA	3	-	1	130	6	30	6	35	-	-	-	-	-	-	Disnakerko p&UM

Kod e	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021		target	Rp (juta)	
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100,00%	100,00%	914.955	100,00%	442	100,00%	501	100,00%	682	100,00%	800	100,00%	900	100,00%	900	Disnakerkop&UM
8	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	327.255	100,00%	56	100,00%	111	100,00%	72	100,00%	200	100,00%	300	100,00%	300	Disnakerkop&UM
9	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100,00%	100,00%	39.353	100,00%	9	100,00%	25					100,00%	15	100,00%	15	Disnakerkop&UM
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA		-		-											Disnakerkop&UM
11	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan Hidup Pemuda	Persentase cakupan organisasi pemuda yang mendapat pelatihan keterampilan	NA	20,00%	361	40,00%		60,00%	90	75,00%	272	80,00%	400	100,00%	450	100,00%	450	Disporaparbud
	Tujuan-5: Menurunkan kemiskinan	Angka kemiskinan	9,59%	9,53%		9,28%		9,00%		8,70%		8,50%		8,40%		8,40%		
	Sasaran 5.1: Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang ditangani	7.000 PMKS	6,40%		6,40%		6,40%		6,40%		6,40%		6,40%		6,40%		Dinas Sosial
1	Program Pelayanan & Rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase penurunan PMKS yang ada	7000 PMKS	6,40%	111	6,40%	86	6,40%	120	6,40%	133	6,40%	250	6,40%	300	6,40%		Dinas Sosial
2	Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang diberdayakan	13,00%	14,00%	1.069	14,50%	837	15,00%	866	17,00%	727	18,50%	1.000	20%	1.500	20%		Dinas Sosial
3	Program Pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	Persentase jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang ditangani	7000 orang	0,50%	326	0,50%	69	0,50%	60	0,50%	292	0,50%	350	0,50%	400	0,50%		Dinas Sosial

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggun jawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4	Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan sosial	Persentase penurunan jumlah Rumah Tangga Sasaran (KK)	35,673		0.00		0.00	0,30%	50	5,00%	345	5,00%	350	5%	400	5%		Dinas Sosial
5	Program Pembinaan panti asuhan/panti jompo	Jumlah panti asuhan/jompo yang difasilitasi	8 Panti	8 Panti	68	8 Panti	60	9 Panti	72			4 Panti	100	4 Panti	100	4 Panti	100	Dinas Sosial
6	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase penyandang cacat dan trauma yang ditangani	1.858 Orang			3,20%	120	1,00%	63	1,00%	52	1,00%	100	1%	100	1%	100	Dinas Sosial
7	Anak Pembinaan Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang ditangani	421 Orang	18,00%	40					1,00%	47	2,00%	100	2%	100	2%	100	Dinas Sosial
8	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100,00%	100,00%	915	100,00%	663	100,00%	992	100,00%	830	100,00%	920	100%	1.000	100%	1.000	Dinas Sosial
9	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	327	100,00%	49	100,00%	154	100,00%	311	100,00%	450	100%	400	100%	400	Dinas Sosial
10	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)		100,00%	39	100,00%	9	100,00%	22					100,00%	15	100,00%	15	Dinas Sosial
11	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA					12,00%	60			35,00%	100	35%	100	35%	100	Dinas Sosial
12	Program Pengembangan Perumahan				1.800		-											Dinas Sosial
	Sasaran 5.2: Meningkatnya akses hunian yang layak	Persentase rumah layak huni	NA	0		89,47%		89,67%		89,88%		90,13%		90,38%		90,38%		
1	Program Pengembangan perumahan	Persentase rumah tidak layak huni yang diberi bantuan	NA	NA	NA	0,64% (82 Unit)	522	2,61% (332 unit)	940	4,57% (582 unit)	12.763	6,93% (882 unit)	4.975	9,29% (1.182 unit)	4.975	9,29% (1.182 unit)	4.975	Perwankim

Kod e	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	MISI IV : Memantapkan sarana dan prasarana dalam mendukung sektor potensial menjadi sektor unggulan daerah yang memiliki daya saing																	
	Tujuan-6: Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dalam mendukung perekonomian	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	45,68%	54,74%		19,90%		27,53%		35,16%		42,79%		52,00%		52,00%		PUPR
	Sasaran 6.1: Meningkatnya kualitas infrastruktur	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	45,68%	54,74%		19,90%		27,53%		35,16%		42,79%		52,00%		52,00%		PUPR
		Persentase panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	33,23%	43,72%		48,66%		66,45%		70,64%		74,80%		78,00%		78,00%		PUPR
1	Program Pembangunan jalan dan jembatan	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	45,68%	54,74%	108.331	19,90%	113.841	27,53%	180.676	35,16%	82.173	42,79%	119.512	52,00%	137.101	52,00%		PUPR
2	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik			22.892		21.944		44.201		26.111		109.555		109.661			PUPR
3	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	33,23%	43,72%	2.758	48,66%	2.047	66,45%	19.234	70,64%	18.127	74,80%	18.127	78,00%	17.837	78,00%		PUPR
4	Program Rehabilitasi/ pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong	Persentase Panjang drainase di sepanjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	13,70%	20,00%	547	22,00%	3.837	24,00%	1.149	26,00%	1.933	29,00%	6.449	32,00%	7.799	32,00%	7.799	PUPR
5	Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik	60,00%	63,00%	756	65,00%	579	70%	1.909	75,00%	813	80,00%	5.333	85,00%	3.747	85,00%	3.747	PUPR
6	Program Rehabilitasi/ pemeliharaan turap/ talud/bronjong	Panjang turap/ talud/bronjong yang dibangun (meter)	NA	0,00%	627	0,00%	28.699	1555	1.466	3100	1.800	3700	1.163	4200	1.339	4200	1.339	PUPR

Kod e	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7	Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Persentase Panjang drainase/ gorong-gorong dalam kondisi baik	13,70%	20,00%	1.993	22,00%	5.286	24%	7.768	26,00%	8.598	29,00%	3.192	32,00%	3.311	32,00%	3.311	PUPR
8	Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong	Persentase panjang turap/ talud/bronjong dalam kondisi baik	NA	-	2.193	-	3.018	-	4.167	-	2.774	-	1.397	-	1.607	-	1.607	PUPR
9	Program Pengembangan Data/Informasi		NA	100,00%	90			100%	4.946	100,00%	348	100,00%	9.301	100,00%	10.674	100,00%	10.674	PUPR
10	Program Pengendalian Banjir	Persentase pengendalian bencana banjir akibat tanggul jebol	NA	0,00%	-	20,00%	149	20,00%	206	20,00%	263	20,00%	200	20,00%	200	20,00%	200	PUPR
11	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	NA	NA	-	NA	9.143	25%	9.066	35,00%	57.417	65,00%	20.806	75,00%	23.646	75,00%	23.646	PUPR
12	Program Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	NA	NA	-	NA	-	25%	4.085	35,00%	4.600	65,00%	13.830	75,00%	15.850	75,00%	15.850	PUPR
13	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase pembangunan sesuai tata ruang	NA	NA	-	NA	-	20%	223	30%	1.039	40%	954	50%	1.006	50%	1.006	PUPR
		Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	NA	8,00%		11,00%		14,00%		16,00%		18,00%		20,00%		20,00%		PUPR
		Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) private	NA	1,00%		1,50%		4,00%		6,00%		8,00%		10,00%		10,00%		PUPR
14	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase pengendalian mutu pelaksanaan pembangunan	NA	NA	NA	NA	296	NA	1.072	-	-	-	-	-	-	-	-	PUPR
15	Program Pengendalian dan pemanfaatan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	70,00%	59	75,00%	65	80,00%	71	80,00%	71	PUPR
16	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Persentase pengendalian mutu pelaksanaan pembangunan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50,00%	983	55,00%	1.082	60,00%	1.190	60,00%	1.190	PUPR



Kod e	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggun giawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
17	Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100,00%	100,00%	786	100,00%	4.112	100%	3.121	100,00%	4.359	100,00%	4.247	100,00%	4.817	100,00%	4.817	PUPR
18	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	963	100,00%	1.580	100%	1.820	100,00%	1.095	100,00%	2.605	100,00%	2.893	100,00%	2.893	PUPR
19	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100,00%	NA	-	100,00%	772	0%	-	0,00%	-	0,00%	0	100,00%	25	100,00%	25	PUPR
20	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA	90,00%	203	92,00%	30	94%	399	96,00%	176	98,00%	736	100,00%	821	100,00%	821	PUPR
21	Program perencanaan pembangunan daerah		NA	0,00%	-	0,00%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-			PUPR
	Sasaran 6.2: Meningkatnya akses infrastruktur dasar	Persentase Rumah Tangga yang memiliki instalasi air bersih (SR)	NA	1,86% (2.764 unit)		2,19% (3.252 unit)		2,54% (3.764 unit)		2,87% (4.264 unit)		3,21% (4.764 unit)		3,55% (5.264 unit)		3,55% (5.264 unit)		Perwankim
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki sanitasi baik	0%	73,40%		74,72%		76,04%		77,36%		78,68%		80,00%		80,00%		Perwankim
1	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase Rumah Tangga yang memiliki instalasi air bersih (Sambungan Rumah)	0,00%	1,86% (2.764 unit)	1.040	2,19% (3.252 unit)	3.973	2,54% (3.764 unit)	18.954	2,87% (4.264 unit)	3.931	3,21% (4.764 unit)	4.500	3,55% (5.264 unit)	5.000	3,55% (5.264 unit)	5.000	Perwankim
		Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	59,04%	60,77%		61,27%		61,78%		62,28%		62,79%		63,30%		63,30%		Perwankim
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki sanitasi baik	0,00%	73,40%		74,72%		76,04%		77,36%		78,68%		80,00%		80,00%		Perwankim

Kod e	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggun giawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2	Program Pembangunan infrastruktur perdesaan	Persentase Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	NA	46,39%	10.857	51,39%	2.525	56,39%	1.737	61,39%	12.976	66,39%	12.500	71,39%	12.500	71,39%	12.500	Perwankim
		Persentase panjang drainase lingkungan dalam kondisi baik		48,71%		53,71%		58,71%		64,71%		69,71%		75,71%		75,71%		Perwankim
3	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau	Persentasi kecamatan yang memiliki taman	NA	NA	2.680	NA	3.508	11,76%	2.331	23,53%	3.002	35,29%	4.710	47,06%	5.500	47,06%	5.500	Perwankim
4	Program Pengelolaan areal pemakaman	Persentase areal pemakaman yang ditata	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	43,43%	199	48,43%	1.750	53,43%	2.000	53,43%	2.000	Perwankim
5	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase konflik pertanahan yang difasilitasi	NA	NA	NA	NA	NA	16,67%	50	33,33%	339	66,67%	300	100%	275	100%	275	Perwankim
6	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah persil lahan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten	NA	NA	NA	1 persil	2.562	0 persil	35	5 persil	32.440	5 persil	10.875	5 persil	10.875	5 persil	10.875	Perwankim
7	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100,00%	100,00%	924	100,00%	794	100,00%	784	100,00%	817	100,00%	1.317	100,00%	1.167	100,00%	1.167	Perwankim
8	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	4.437	100,00%	432	100,00%	459	100,00%	833	100,00%	1.179	100,00%	758	100,00%	758	Perwankim
9	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100,00%	100,00%	23	100,00%	14	100,00%	25	0,00%	0	0,00%	0	100,00%	25	100,00%	25	Perwankim
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA	NA	0	100,00%	97			100,00%	159	100,00%	150	100,00%	150	100,00%	150	Perwankim

Kod e	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
11	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase Panjang saluran drainase permukiman dalam kondisi baik	5,92%	6,20%	1.812	6,50%	947											Perwankim
12	Program Pembangunan Prasarana Sanitasi	Persentase rumah tangga pengguna sanitasi	72,40%	73,40%	5.370	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0			Perwankim
	Sasaran 6.3: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (persen)	NA	42		45		50		51,2		52,4		53,6		53,6		
1	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas air	NA	68,65	233	73	319	82	229	83,75	1.001	85,5	630	87	680	87	680	Dinas LH
		Indeks kualitas udara	NA	68,7		74,35		82		83,75		85,5		87		87		Dinas LH
2	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Persentase tutupan lahan/ hutan	NA	2,00%	439	2,00%	107	2,00%	86,6	2,50%	77	3,00%	210	3,50%	171	3,50%	171	Dinas LH
3	Program Peningkatan pengendalian polusi	Persentase jumlah kendaraan yang lulus uji emisi	NA	-	-	50,00%	13	55,00%	11	-	-	-	-	-	-	55%	24	Dinas LH
4	Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang didapat	1	2	139	3	272	2	353	3	366	3	250	4	415	4	415	Dinas LH
5	Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R	NA	0,50%	905	0,50%	1.753	0,50%	3.600	0,50%	3.176	0,50%	4.100	0,50%	4.261	2,50%	4.261	Dinas LH
		Persentase Timbulan sampah yang ditangani	NA	NA		43,00%		45,00%		45,00%		45,00%		45,00%		45,00%		Dinas LH

Kod e	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021		target	Rp (juta)	
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
6	Program Penegakan Hukum Lingkungan	Persentase penyelesaian kasus lingkungan	NA	-	-	-	-	100,00%	36	100,00%	48	100,00%	80	100,00%	80	100%	80	Dinas LH
7	Program Penataan Peraturan Perundang- undangan	Ranperda pengelolaan lingkungan hidup	NA	-	-	-	-	2	137	-	-	1	80	-	-	3	217	Dinas LH
8	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100,00%	100,00%	440	100,00%	1.099	100,00%	688	100,00%	544	100,00%	620	100,00%	668	100,00%	668	Dinas LH
9	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100,00%	100,00%	31	100,00%	28	100,00%	14	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas LH
10	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100,00%	-	-	60,00%	537	-	-	-	-	-	-	70,00%	200	70,00%	200	Dinas LH
11	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA	-	-	6,00%	23	12,00%	26	-	-	14,00%	30	16,00%	15	16,00%	15	Dinas LH
MISI V : Mendorong pemberdayaan, kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan																		
	Tujuan-7: Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat	Jumlah Desa cepat berkembang	NA	1		9		9		9		9		9		46		
	Sasaran 7.1: Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat	Jumlah Desa cepat berkembang	NA	1		9		9		9		9		9		46		DPMD
1	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase pengurus lembaga kemasyarakatan desa yang memiliki kapasitas memahami tugas pokok dan fungsi	55,00%	57,00%	1.110	59,00%	1.277.	60,00%	1.254	65,00%	982	70,00%	1.000	75%	1.125	75%	1.125	DPMD

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggun gijawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2	Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Persentase aparatur pemerintahan desa yang memiliki kapasitas untuk melaksanakan tugas	NA	80,00%	388	85,00%	197	90,00%	290	91,00%	434	92,00%	530	93%	550	93%	550	DPMD
3	Program Pengembangan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna	Jumlah inovator dan alat TTG yang diberdayakan	2	2	71	2	77	2	100	2	80	2	100	2	200	2	200	DPMD
4	Program Pengembangan Usaha Ekonomi pedesaan	Persentase desa yang memiliki BUMDes	NA	NA	-	30,00%	300	40,00%	109	41,00%	116	42,00%	135	43%	175	43%	175	DPMD
5	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa yang melaksanakan gotong-royong 1 kali sebulan	60,00%	65,00%	47	70,00%	9	-	-	77,00%	111	79,00%	112	80%	115	80%	115	DPMD
6	Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang memiliki administrasi baik	NA	NA	-	75,00%	44	85,00%	710	86,00%	330	87,00%	380	88%	390	88%	390	DPMD
7	Program Penataan Desa	Persentase desa yang telah memiliki data kewilayahan desa	NA	NA	974	-	-	85,00%	64	86,00%	66	90,00%	100	100%	150	100%	150	DPMD
8	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Perda yang dirancang	1	1	49	1	86	1	75	1	90	1	98	1	130	1	130	DPMD
9	Program Peningkatan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk	NA	NA	-	NA	-	1	51	2	10	2	85	2	120	2	120	DPMD
10	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100,00%	100,00%	910	100,00%	999	100,00%	1.062	100,00%	1.092	100,00%	1.299	100%	1.507	100%	1.507	DPMD
11	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	42	-	-	100,00%	17	100,00%	5	100,00%	20	100%	22	100%	22	DPMD

Kod e	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggun gjawab
				Realisasi		Realisasi		Target		Target		Target		Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Target Tahun 2021				
				realisasi	Rp (juta)	realisasi	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
12	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	NA	100,00%	34	100,00%	30	100,00%	82	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMD
13	Program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	80,00%	85,00%	831	90,00%	281											DPMD

BUPATI SERDANG BEDAGAI



H. SOEKIRMAN

## KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi dasar perlunya dilakukannya penyesuaian format Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah, selain dari pada itu dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 maka dipandang perlu dilakukan perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 memuat tujuan, sasaran, yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai 5 (lima) tahun ke depan serta strategi, kebijakan serta rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai terpilih. Dokumen Rencana Strategis ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan serta penganggaran dapat lebih terpadu, terarah serta konsisten dalam mencapai tujuan pembangunan sehingga pelayanan wajib lingkungan hidup dapat terpenuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Demikianlah dokumen ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam perencanaan dan penganggaran selama tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai dan menjadi bahan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan selama periode masa Renstra.

Sei Rampah, 2019  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



H. PANISEAN TAMBUNAN, S.Sos  
PEMBINA

19630101 199103 1 015

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II      GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI .....</b>	<b>6</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup .....	6
2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup.....	15
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	24
<b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI .....</b>	<b>26</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	26
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	27
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup.....	29
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	31
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	31
<b>BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>33</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.	33
<b>BAB V      STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>35</b>
<b>BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF .....</b>	<b>38</b>
<b>BAB VII    KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB VIII   PENUTUP .....</b>	<b>43</b>
8.1. Pedoman Transisi .....	43
8.2. Kaidah Pelaksanaan .....	43
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>vi</b>



## DAFTAR TABEL

2.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan .....	15
2.2. Komposisi Pegawai Beradasrkan Kualifikasi Pendidikan .....	16
2.3. Kualifikasi Pendidikan Pejabat Struktural .....	16
2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup .....	17
2.5. Kepemilikan Dokumen Lingkungan Tahun 2015 .....	19
2.6. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2011-2015 .....	22
2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2017 .....	23
3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah untuk Penentuan Prioritas Sasaran .....	27
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup .....	34
5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	37
7.1 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	40
7.2. Formulasi IKU .....	42

**DAFTAR GAMBAR**

2.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang  
Bedagai ..... 8

**DAFTAR LAMPIRAN**

I      Lampiran I ..... vi



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai menjadi dasar perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD). OPD yang mengalami perubahan salah satu diantaranya adalah Kantor Lingkungan Hidup yang berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup. Perubahan ini berdampak pada perubahan tugas pokok dan fungsi dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab lingkungan hidup Kabupaten Serdang Bedagai yang dirumuskan dalam visi, misi, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan. Perubahan ini tentunya berdampak juga pada perencanaan lima tahunan yaitu renstra yang semula Kantor menjadi Dinas, atas dasar tersebut maka perlu dilakukan perubahan atas Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 menjadi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021.

Selain perubahan nomenklatur dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjadi salah satu dasar perlunya dilakukan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai sehingga indikator kinerja penyelenggaraan urusan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang ada. Sesuai Pasal 13 ayat (1) Permendagri 86 Tahun 2017 pengertian Renstra Perangkat Daerah yaitu memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Berkenaan dengan hal tersebut maka keluarlah Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021.

Renstra ini mempunyai fungsi sebagai acuan, pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama lima tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perubahan RPJMD 2016-2021 dilakukan karena adanya perubahan beberapa kebijakan nasional sehingga dilakukan pengendalian dan evaluasi dimana hasilnya bahwa RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai 2016-2021 harus dilakukan perubahan. Dengan perubahan RPJMD, sesuai Pasal 342 ayat (4) Permendagri 86 Tahun 2017 Perangkat Daerah melakukan Perubahan Renstra PD dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD tersebut. Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai Pasal 359 Permendagri 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa tahapan penyusunan renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 s.d 124 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan



Renstra Perangkat Daerah dengan tahapan (a) persiapan penyusunan, (b) penyusunan rancangan awal, (c) penyusunan rancangan, (d) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, (e) perumusan rancangan akhir, dan (f) penetapan.

Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai menjadi dasar perubahan, Renstra Dinas Lingkungan Hidup yang kemudian menjadi pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan selama lima tahun, dengan demikian perubahan renstra Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2016-2021 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
19. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 adalah:



1. Penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi untuk mencapai Visi, Misi dan Program yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Penyesuaian indikator kinerja sebagaimana yang tertuang dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
3. Menyediakan Dokumen Perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahunan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Sebagai tolok ukur keberhasilan atas Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai adalah:

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai target pencapaian RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021.
2. Memberikan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT), evaluasi dan pelaporan atas kinerja dalam 5 (lima) tahunan.
3. Menyelaraskan antara Rencana Kinerja Tahunan dengan Visi dan Misi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serdang Bedagai dan dokumen perencanaan lainnya.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 adalah:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

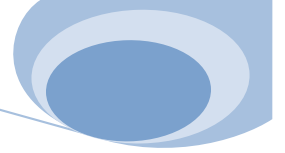
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
- 2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup



- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**

**BAB VIII PENUTUP**





## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup**

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai menjadi dasar terbentuknya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai yang sebelumnya berbentuk Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 24 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 30 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai. Lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 6 Tahun 2016 bahwa Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, kebersihan, persampahan, kehutanan, dan energi sumber daya mineral.

Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai menguraikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.100/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2016 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
2. Merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup;
3. Memberikan perizinan dan pelayanan umum di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup;
4. Mengelola urusan ketatalaksanaan dinas.

Adapun organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja



Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Bagian Kesepuluh Paragraf 2 Pasal 31, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat

Terdiri dari:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Perencanaan, Akuntabilitas dan Keuangan
- c. Bidang Penataan dan Penataan PPLH

Terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
- b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
- c. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

Terdiri dari:

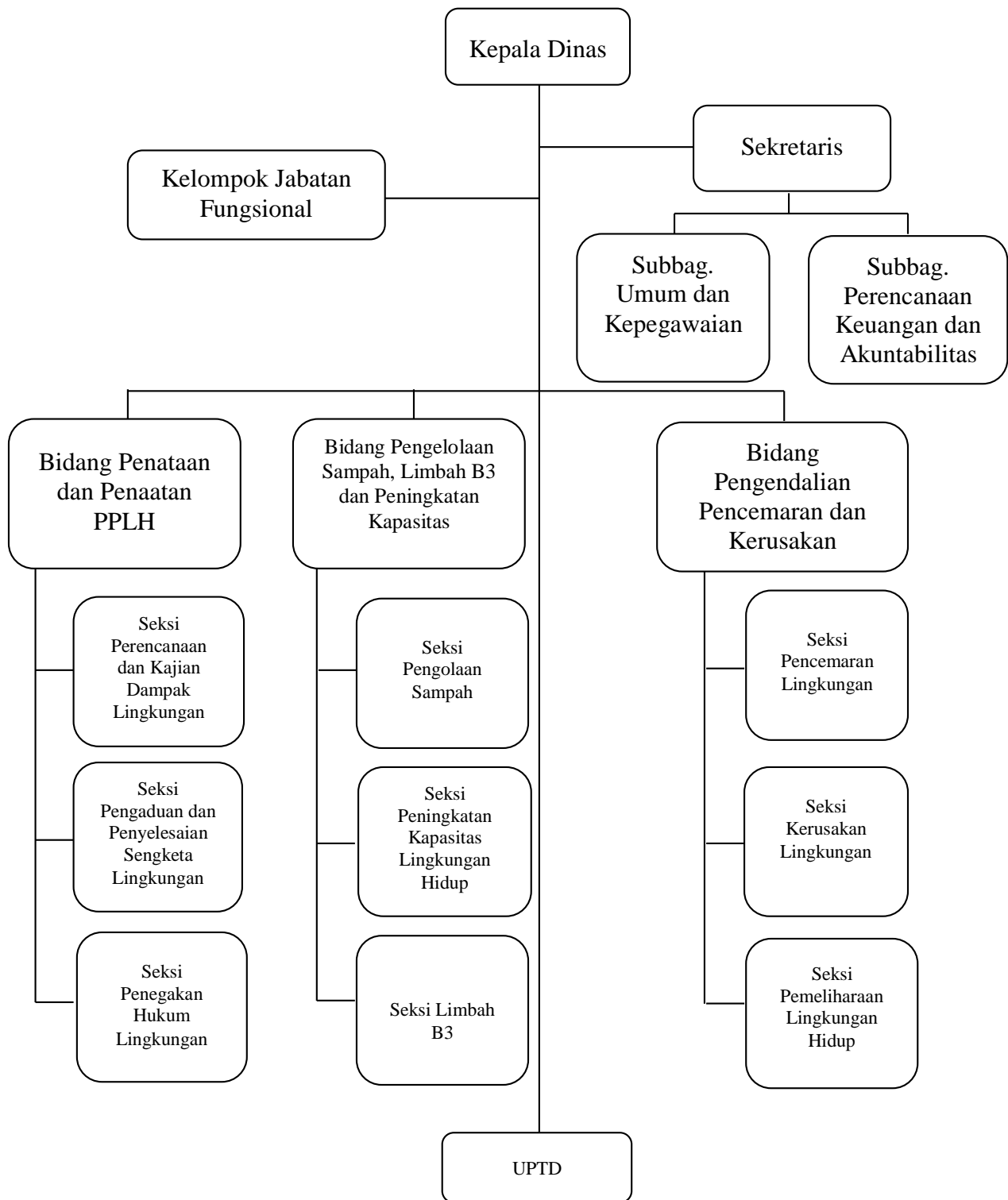
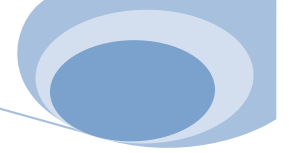
- a. Seksi Pengelolaan Sampah
- b. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- c. Seksi Limbah B3
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Terdiri dari

- a. Seksi Pencemaran Lingkungan
- b. Seksi Kerusakan Lingkungan
- c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Struktur organisasi tersebut juga akan didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Laboratorium.

Dengan demikian struktur organisasi dari Dinas Lingkungan Hidup dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. SERDANG BEDAGAI**

#### **a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas**

##### **Tugas Pokok :**

Membantu Bupati di bidang penataan dan penataan PPLH, pengelolaan sampah, Limbah B3 dan peningkatan kapasitas serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

##### **Fungsi :**

1. Perumus kebijakan teknis dan pelaksana kewenangan daerah di bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan



sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, serta pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;

2. Perencana dan Pelaksana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan di bidang penataan dan penataan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3 serta melaksanakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sesuai ketentuan yang ditetapkan;
3. Koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pengembangan kapasitas pengawasan dan pengendalian serta pencegahan dampak lingkungan dan penanggulangan kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai ketentuan yang ditetapkan;
4. Pelaksana pelayanan administrasi internal dan eksternal;
5. Pelaksana tugas lain yang diberikan Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
6. Pemberi saran dan masukan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
7. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati dan Sekretaris Daerah, sesuai standar yang ditetapkan.

#### **b. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris**

##### **Tugas Pokok :**

Membantu Kepala Dinas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, perencanaan program dan akuntabilitas.

##### **Fungsi :**

1. Penyusun dan penyempurna standar penyelenggaraan urusan umum pengelolaan keuangan, pemberdayaan pegawai.
2. Penyelenggara administrasi perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan umum, pemberian izin lingkungan, pembinaan SDM lingkungan dan peningkatan kapasitas, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
3. Koordinasi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan dinas, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
4. Perencana pengadaan kebutuhan internal dan administrasi dinas serta penyempurnaan peningkatan pengelolaan dan pengendalian atas pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
5. Perencana pengelolaan dan pengurusan pertanggungjawaban keuangan dinas sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
6. Perencana dan pengelola dan meningkatkan pemberdayaan pegawai sesuai dengan ketentuan;
7. Pemberi masukan dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;



8. Pelaksana tugas lain yang diberikan Kepala Dinas;
9. Pembuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Dinas.

**c. Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Kepala Bidang Penataan dan Pernaatan PPLH**

**Tugas Pokok:**

membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan serta penegakan hukum lingkungan.

**Fungsi:**

1. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
2. Penyusunan dokumen RPPLH;
3. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
5. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
6. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
7. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
8. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
9. Penyusunan NSDA dan LH;
10. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
11. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
12. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
13. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
14. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
15. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
16. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
17. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
18. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, audit LH, analisis resiko LH);
19. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) usaha dan/atau kegiatan industri dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral;
20. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
21. Pelaksanaan proses izin lingkungan usaha dan/atau kegiatan industri dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral;



22. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
23. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
24. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
25. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
26. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
27. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
28. Sosialisasi tata cara pengaduan;
29. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
30. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
31. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
32. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
33. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
34. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan
35. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
36. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
37. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
38. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
39. Pelaksanaan penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten.

**d. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas**

**Tugas Pokok:**

Membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup di bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

**Fungsi:**

1. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;



2. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
3. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
4. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/ industri;
5. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
6. Pembinaan pendaurulangan sampah;
7. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
8. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
9. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
10. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
11. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
12. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
13. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
14. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
15. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
16. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
17. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
18. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
19. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
20. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
21. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
22. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
23. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
24. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
25. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;





26. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
27. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
28. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
29. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
30. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
31. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
32. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
33. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
34. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
35. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
36. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
37. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
38. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
39. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
40. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
41. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
42. Penyiapan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
43. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
44. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;





45. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
46. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
47. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
48. Penyiapan sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan LH;
49. Pengembangan jenis penghargaan LH;
50. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
51. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
52. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
53. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

**e. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

**Tugas Pokok:**

Membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

**Fungsi:**

1. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
2. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
3. Penentuan baku mutu lingkungan;
4. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
5. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, emidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemaran institusi dan non institusi;
6. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
7. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
8. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
9. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
10. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
11. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
12. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
13. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
14. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
15. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;



16. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
17. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
18. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
19. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
20. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
21. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
22. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
23. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
24. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
25. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
26. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

## 2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai terdiri atas sumber daya manusia serta asset/modal.

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Keadaan pegawai Dinas Lingkungan Hidup pada Juli 2019 memiliki 26 (dua puluh enam) PNS dan 64 (enam puluh empat) orang tenaga kontrak yang terdiri atas 14 (empat belas) orang tenaga kontrak di bagian administrasi kantor, dan 50 (lima puluh) orang tenaga kontrak sebagai petugas kebersihan di bagian persampahan. Berdasarkan pangkat dan golongan, pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai berpangkat mulai dari yang tertinggi Pembina Tk. I (IV/b), dan terendah Pengatur (II/c).

**Tabel 2.1**  
**KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN**

No	Ruang Kepangkatan/ Golongan	Jumlah
1.	Pembina Tk. I (IV/b)	1 Orang
2.	Pembina (IV/a)	3 Orang
3.	Penata Tk. I (III/d)	6 Orang
4.	Penata (III/c)	6 Orang
5.	Penata Muda Tk. I (III/b)	7 Orang
6.	Penata Muda (III/a)	1 Orang
7.	Pengatur Tk. I (II/d)	1 Orang
8.	Pengatur (II/c)	1 Orang
<b>Total</b>		<b>26 Orang</b>

Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dijabarkan dalam Tabel 2.2 berikut:



**Tabel 2.2**  
**KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2 (S2)	6 Orang
2.	Strata 1 (S1)	17 Orang
3.	Diploma 3 (D3)	2 Orang
4.	SLTA	1 Orang
<b>Total</b>		<b>26 Orang</b>

Berdasarkan kualifikasi pendidikan tersebut, pegawai yang menduduki jabatan struktural rata-rata memiliki pendidikan S1 dan S2. Adapun jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serdang Bedagai adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**KUALIFIKASI PENDIDIKAN PEJABAT STRUKTURAL**

No	Jabatan Struktural	Pendidikan	Jumlah
1.	Eselon II	Strata 1 (S1)	1 Orang
2.	Eselon III	Strata 1 (S1)	2 Orang
		Strata 2 (S2)	2 Orang
3.	Eselon IV	Strata 1 (S1)	8 Orang
		Strata 2 (S2)	4 Orang
<b>Total</b>			<b>17 Orang</b>

Kondisi pejabat struktural belum linear antara jabatan dengan gelar pendidikan yang dimiliki, serta masih sangat minim SDM yang memiliki sertifikat sebagai penilai AMDAL, penyusun AMDAL, Analis Laboratorium, PPNS dan PPLHD.

### **2.2.2. Aset**

Salah satu faktor pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai adalah dengan tersedianya sarana dan prasarana pendukung. Aset yang dikuasai oleh Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Desember 2018 adalah Rp. 4.232.865.794,50 dan aset yang tidak digunakan karena dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat dimanfaatkan kembali, tercatat sebesar Rp. 1.490.021.000.

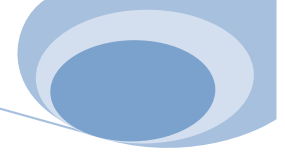
## **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup**

Kinerja pelayanan pada periode waktu sebelumnya merupakan kinerja pelayanan dengan nomenklatur masih berupa Kantor Lingkungan Hidup. Untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan tersebut dapat dijelaskan dalam Tabel 2.4 Sesuai tugas pokok dan fungsinya sampai dengan tahun 2017 Lingkungan Hidup telah melaksanakan beberapa kegiatan dan pelayanan sebagai bentuk kinerjanya dengan target dan indikator kinerja sebagai berikut:

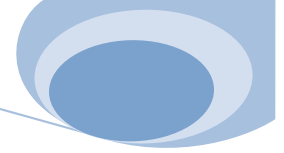


**Tabel 2.4**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Persentase Penanganan Sampah	70%	70%	80%	-	-	9.27%	7.62%	12.2%	-	-	13.2%	10.8%	15.3%	-	-
2	Pencemaran Status Mutu Air	14%	12%	10%	-	-	0%	0%	0%	-	-	0%	0%	0%	-	-
3	Cakupan Pengawasan Terhadap Pengawasan AMDAL	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-
4	Penegakan Hukum Lingkungan	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-
5	Indeks kualitas air	-	-	-	68.65%	73.00%	-	-	-	68.65%	73.00%	-	-	-	100%	100%
6	Indeks kualitas udara	-	-	-	68.70%	74.35%	-	-	-	68.70	74.35%	-	-	-	100%	100%
7	Persentase tutupan lahan/hutan	-	-	-	2%	2%	-	-	-	2%	2%	-	-	-	100%	100%
8	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang didapat	-	-	-	2	3	-	-	-	2	3	-	-	-	100%	100%
9	Persentase jumlah kendaraan yang lulus uji emisi	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	55%	-	-	-		
10	Persentase volume sampah yang berkurang	-	-	-	0.5%	0.50%	-	-	-	0.50%	0.50%	-	-	-	100%	100%



	melalui 3R ( <i>reduce, reuse, dan recycling</i> )															
11	Persentase timbunan sampah yang ditangani	-	-	-	NA	43%	-	-	-	NA	43%	-	-	-	100%	100%
12	Persentase penyelesaian kasus lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Ranperda pengelolaan lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



### a. Penanganan Sampah

Dari hasil inventarisasi yang dilakukan, persentase pelayanan penanganan sampah masih sangat jauh dari target yang ditetapkan. Kendala yang dihadapi antara lain akibat sarana dan prasarana penanganan sampah yang masih belum mencukupi sehingga penanganan sampah masih terbatas pada beberapa kecamatan, dan penanganan sampah yang dilakukan masih sebatas pada pengangkutan sampah dari masyarakat ke TPA, sedangkan di TPA sendiri belum ada pengelolaan (*open dumping*).

Sedangkan pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat juga masih sangat terbatas. Pengadaan mesin pencacah sampah organik sebanyak 12 (dua belas) unit dan Bank sampah yang telah terbangun di 7 (tujuh) lokasi, dikelola oleh kelompok masyarakat, dengan pengelolaan yang masih terbatas, sehingga tidak begitu signifikan menaikkan persentase penanganan sampah. Tetapi keberadaan rumah kompos dan bank sampah sangat bermanfaat bagi masyarakat, disamping untuk melestarikan lingkungan dan mengurangi timbunan sampah, bank sampah juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

### b. Pencemaran Status Mutu Air

Untuk pelayanan ini masih belum dilaksanakan. Adapun indikator pelayanan ini berkaitan dengan kawasan pemukiman dengan rumusan:

$$\frac{\text{Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber mata air yang dipantau}}{\text{Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber mata air}}$$

Di Kabupaten Serdang Bedagai belum ada kawasan pemukiman atau industri, sedang sumber mata air ada di dua lokasi yaitu sumber mata air Tinoppah di Kecamatan Silindak dan sumber mata air pancuran di Kecamatan Kotarih. Tetapi pada kedua sumber mata air tersebut belum dilakukan pemantauan.

### c. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL

Dalam upaya pencegahan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah mewajibkan setiap pelaku usaha/kegiatan yang akan melakukan kegiatannya atau membangun perusahaannya di wilayah Serdang Bedagai untuk menyusun dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa dokumen AMDAL, UKL/UPL ataupun SPPL. Dari data sampai tahun 2015 terdapat 516 usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**KEPEMILIKAN DOKUMEN LINGKUNGAN TAHUN 2015**

No	Jenis Dokumen Lingkungan	Jumlah
1	AMDAL	10 usaha/kegiatan
2	UKL-UPL	64 usaha/kegiatan
3	SPPL	442 usaha/kegiatan
	<b>Jumlah</b>	<b>516 usaha/kegiatan</b>



Di Kabupaten Serdang Bedagai terdapat 10 (sepuluh) Perusahaan wajib AMDAL, yaitu:

1. PTPN IV ADOLINA (PKS)
2. PT. AQUAFARM
3. PT. SOCFINDO MATAPAO
4. PTPN. III PKS DAN KARET RAMBUTAN
5. PTPN IV PKS PABATU
6. PTPN III GUNUNG PARA
7. PT. SOCFINDO TANAH BERSIH
8. PTPN III SARANG GITING
9. PTPN III SILAU DUNIA
10. SOCFINDO BANGUN BANDAR

Terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, telah dilakukan pengawasan secara berkala atas pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen AMDAL. Dari hasil pengawasan, jika terdapat penyimpangan atau kesalahan akan segera ditindaklanjuti

#### **d. Penegakan Hukum Lingkungan**

Pengaduan atas kasus lingkungan yang diterima tahun 2011 s/d 2015 secara umum telah ditindaklanjuti atau ditangani, baik melalui mediasi antara pelaku usaha yang dilaporkan dengan si pelapor, melalui teguran atau tindakan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja dalam layanan ini dikategorikan cukup baik.

Sehubungan dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- 1) Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air;

Dari hasil perhitungan yang dilakukan pada pelayanan ini, pencapaian memenuhi target 100%, dalam arti bahwa seluruh seluruh kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan air.

- 2) Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara;

SPM ini juga dicapai dengan nilai 100%, dimana seluruh kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara.



- 3) Persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya;

Untuk pelayanan ini, belum memenuhi target yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008, yaitu masih mencapai 6%, dimana lahan yang telah ditetapkan status kerusakannya untuk produksi biomassa seluas 9.529,58 Ha, sedang luasan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa adalah seluas 158.396,60 Ha.

- 4) Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

Untuk pelayanan ini, pencapaian target sebesar 100%, dimana pengaduan yang diterima instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun seluruhnya ditindaklanjuti. Adapun pengaduan yang diterima dan ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

- Pencemaran udara akibat pembakaran janjang kosong an. Beng Cui di Kec. Pegajahan
- Pencemaran udara akibat peternakan ayam di Desa Sukasari
- Kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir laut di Pantai Cermin
- Pencemaran udara akibat penjemuran ampas ubi kayu an. Zulfikar
- Pencemaran air akibat pencucian cangkang di Desa Sukadamai
- Pencemaran udara akibat peternakan bebek di Desa Pangkalan Budiman
- Pencemaran udara akibat limbah kilang padi di Desa Penggalangan Kec. Sei Bambi
- Pencemaran udara akibat peternakan ayam di Pematang Guntung
- Pencemaran air akibat kegiatan PT. THS Kec. Dolok Masihul
- Pencemaran udara akibat peternakan babi di Kec. Teluk Mengkudu
- Timbulnya hewan kaki seribu akibat tandan kosong PTPN. III Kebun Rambutan
- Pencemaran air akibat kegiatan PT. Florindo Makmur Kec. Sei Rampah

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup dirincikan dalam Tabel 2.6 berikut:





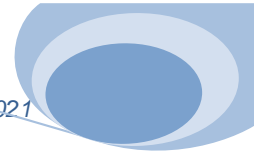
**Tabel 2.6**  
**PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2011-2015**

No	Target SPM	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	3%	6%	0%	0%	0%	3%	6%
4	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	66.6%	85.7%	100%	100%	100%



**Tabel 2.7**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase Penanganan Sampah	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	Pencemaran Status Mutu Air	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	Cakupan Pengawasan Terhadap Pengawasan AMDAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	Penegakan Hukum Lingkungan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	Indeks kualitas air	NA	NA	NA	256.787.000	430.605.000	NA	NA	NA	233.805.595	319.164.490	67,68%	36,50%
6	Indeks kualitas udara												
7	Persentase tutupan lahan/hutan	NA	NA	NA	446.125.000	107.200.000	NA	NA	NA	439.895.000	107.160.000	-75,97%	-75,63%
8	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang didapat	NA	NA	NA	146.440.000	278.190.000	NA	NA	NA	139.172.500	272.648.000	89,96%	95,90
9	Persentase jumlah kendaraan yang lulus uji emisi	NA	NA	NA	0	13.175.000	NA	NA	NA	0	13.175.000	100%	100%
10	Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R ( <i>reduce, reuse, dan recycling</i> )	NA	NA	NA	983.807.000	1.881.170.000	NA	NA	NA	905.730.000	1.753.153.436	91,21%	93,56%
11	Persentase timbulan sampah yang ditangani												
12	Persentase penyelesaian kasus lingkungan	NA	NA	NA	0	0	NA	NA	NA	0	0	0	0
13	Ranperda pengelolaan lingkungan	NA	NA	NA	0	0	NA	NA	NA	0	0	0	0



## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai**

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mencegah keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu menghadapi ancaman (*threats*) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mampu membuat ancaman (*threats*) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Analisa SWOT diatas sangat efektif bila dihubungkan dengan perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 dalam menentukan perencanaan Program dan Kegiatan lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

### **a. Strength/Kekuatan**

*Strength*/Kekuatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai yang menangani Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Serdang Bedagai yaitu:

1. Urusan Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib sehingga seyogyanya menjadi prioritas.
2. Kondisi Tanah, Air dan Udara di Kabupaten Serdang Bedagai belum terlalu tercemar jadi masih dapat ditangani.
3. Memiliki laboratorium lingkungan hidup sendiri.

### **b. Weakness/Kelemahan**

*Weakness*/kelemahan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serdang Bedagai yaitu:

1. Keterbatasan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serdang Bedagai yang berdampak pada kinerja pelayanan.
2. Kurangnya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana lingkungan hidup.
3. Laboratorium Lingkungan Hidup belum terakreditasi.



4. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai masih kurang dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Penanganan lingkungan hidup belum sampai ke pelosok wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dikarenakan sarana dan prasarana penunjang belum memadai dan kondisi geografis yang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai.

**c. Opportunity/Peluang**

*Opportunity*/peluang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai yaitu:

1. Dukungan program, kegiatan dan anggaran dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan Visi Kabupaten Serdang Bedagai yaitu:

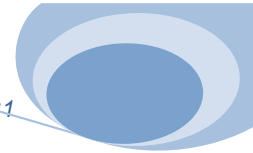
***“MENJADIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI SEBAGAI KABUPATEN YANG UNGGUL, INOVATIF DAN BERKELANJUTAN”.***

2. Adanya laboratorium lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai menjadi peluang besar untuk hasil pemantauan yang lebih akurat.
3. Adanya Bank Sampah dan Pokja Persampahan menunjukkan bahwa sebahagian masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai masih memperhatikan masalah lingkungan khususnya masalah persampahan.

**d. Threat/Ancaman**

*Threat*/ancaman pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai yaitu:

1. Masyarakat, dunia usaha dan aparaturnya banyak yang belum menyadari akan pentingnya menjaga lingkungan hidup, agar terhindar dari terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah belum optimal mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis belum dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan atau/program pembangunan dalam suatu wilayah.
4. Masih banyak dunia usaha belum memiliki izin lingkungan dan dokumen lingkungan.



### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup**

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor tentang Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, kebersihan, persampahan, kehutanan, dan energi sumber daya mineral.

Untuk melaksanakan tugas yang telah diuraikan sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
2. Merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup;
3. Memberikan perizinan dan pelayanan umum di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup;
4. Mengelola urusan ketatalaksanaan dinas.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai, beberapa permasalahan utama urusan lingkungan hidup yang dihadapi antara lain:

1. Fasilitas sarana dan prasarana persampahan yang masih minim.
2. Pemanfaatan TPA masih berupa *open dumping*.
3. Minimnya pemahaman masyarakat akan pengelolaan sampah berbasis 3R (*reduce, reuse* dan *recycling*).
4. Jangkauan pelayanan sampah yang masih menangani 7 (tujuh) kecamatan.
5. Pengelolaan sistem air limbah dan drainase yang belum optimal.
6. Kurangnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan terhadap kebijakan lingkungan.
7. Pencemaran badan air oleh limbah industri dan limbah domestik harus ditekan.
8. Pencemaran udara oleh emisi sumber tidak bergerak (cerobong asap industri) harus menjadi perhatian.
9. Kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan.

Dalam menghadapi berbagai permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016-2021 membuat beberapa



sehingga 21 perairan dapat diraih dan permasalahan yang ada dapat diatasi sehingga indikator kinerja pada akhir tahun 2021 dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan.

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kualitas Lingkungan Hidup	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Kurangnya konservasi dan pencegahan kerusakan atas sumber daya alam
			Tingginya potensi pencemaran oleh usaha/perorangan
		Kurangnya informasi terkait kualitas lingkungan	Minimnya informasi terkait kualitas lingkungan
			Laboratorium yang belum terakreditasi
2.	Kepuasan Masyarakat akan akan Pelayanan Urusan Lingkungan	Tingginya timbulan sampah dan limbah masyarakat	Minimnya sarana prasarana persampahan
			Minimnya pengetahuan masyarakat atas pengelolaan sampah berbasis 3R
			Belum adanya penanganan limbah padat manusia
		Semakin banyaknya pengaduan	Tingginya kasus pencemaran lingkungan
			Masih adanya usaha/pelaku usaha yang tidak taat pada kebijakan pengelolaan lingkungan

**3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah**

Visi Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 adalah:

**“MENJADIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI SEBAGAI KABUPATEN YANG UNGGUL, INOVATIF DAN BERKELANJUTAN”**

Makna yang terkandung dalam visi dapat diuraikan sebagai berikut:

**Unggul** yaitu kemampuan mengelola sumber daya lokal yang lebih efektif dan efisien, bekerja keras, rajin, mampu, sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas daya saing daerah sehingga



menjadikan Kabupaten Serdang Bedagai memiliki nilai tambah dari daerah lainnya.

**Inovatif** yaitu memanfaatkan setiap peluang guna mendorong kemandirian masyarakat dalam mewujudkan hal-hal terbaru dalam pelaksanaan proses pembangunan yang dapat meningkatkan daya saing produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

**Berkelanjutan** yaitu mendorong produktivitas dan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat saat ini dan yang akan datang sehingga dapat tercipta pemerataan pembangunan serta perlindungan terhadap masyarakat marginal.

Sedangkan misi yang diemban untuk mencapai visi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 yaitu:

**Misi Pertama** meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat pada umumnya dan aparatur khususnya melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan cinta terhadap daerah serta menumbuhkembangkan kehidupan berbudaya dan bermartabat.

**Misi Kedua** meningkatkan investasi dan daya saing daerah melalui pemberdayaan sumber daya lokal dan penciptaan energi terbarukan.

**Misi Ketiga** mewujudkan masyarakat yang berjiwa wirausaha dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mengembangkan berbagai produk unggulan daerah yang berorientasi pasar guna mempercepat penanggulangan kemiskinan.

**Misi Keempat** memantapkan sarana dan prasarana dalam mendukung sektor potensial menjadi sektor unggulan daerah yang memiliki daya saing.

**Misi Kelima** mendorong pemberdayaan, kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Telaahan terhadap visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana salah satu yang menjadi prioritas adalah masalah lingkungan hidup yang memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai. Keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup terletak pada Misi Keempat dengan tujuan pertama mewujudkan sarana prasarana yang mantap (nyaman dan umur pakai panjang) dan merata dengan sasaran strategis



keempat yaitu meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas. Visi dan misi yang akan ditetapkan menggambarkan perhatian Kepala Daerah terhadap lingkungan, terhadap pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi dan sosial, juga memperhatikan aspek lingkungan.

Selain dari pada itu fokus dalam pembangunan 5 (lima) tahun kedepan adalah 21 perairan, dan diantara 21 perairan tersebut yang berkaitan dengan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terbangunnya ruang terbuka hijau (RTH), dan tersedianya layanan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dinas Lingkungan Hidup berkontribusi dalam perairan peningkatan PAD melalui retribusi jasa umum-persampahan dan retribusi jasa layanan-laboratorium, selain dari pada itu Dinas Lingkungan hidup juga telah menangani pengaduan masyarakat terkait kasus-kasus lingkungan, demikian juga dalam pembangunan ruang terbuka hijau, Dinas Lingkungan Hidup dapat berkontribusi dengan menyediakan sarana prasarana pendukung berupa pengadaan tong sampah organik dan anorganik serta pengadaan bibit tanaman.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup**

Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan GotongRoyong”. Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah: (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdayasaing; (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan, (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan 9 agenda pembangunan Tahun 2015-2019, yang didalamnya memuat sub agenda dan sasaran yang hendak dicapai dan menjadi amanat bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelaksanaan pembangunan dibagi ke dalam prioritas nasional, yang memuat sasaran pembangunan yang memiliki kaitan langsung dengan janji Presiden dan Wakil Presiden; prioritas bidang, yang memuat





sasaran yang memiliki kaitan terhadap bidang sumber daya alam dan lingkungan untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan lintas bidang yang sasarannya merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian. Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah : (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species*; (3) Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumber daya. Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah : (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42.

Selaras dengan Renstra KLHK maka Dinas Lingkungan Hidup telah menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan program prioritas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2016-2021 yaitu:

- a. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- b. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
- c. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
- d. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- e. Program peningkatan pengendalian polusi
- f. Program penegakan hukum lingkungan
- g. Program penataan peraturan perundang-undangan



Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa masalah persampahan terkendala karena sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang masih belum mencukupi dan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang cukup luas, sehingga penanganan sampah tidak mencapai pelosok kabupaten.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai 2013-2033, bahwa ditetapkan di Kecamatan Sei Rampah dengan fungsi sebagai Pusat Pemerintahan dan Perkantoran, Permukiman Perkotaan serta Perdagangan dan Jasa. Kawasan Pusat Pemerintahan dan Pusat Perkantoran di Kota Sei Rampah akan diarahkan di Desa Firdaus, yakni dilokasi lahan Perkebunan PT.PP Lonsum dengan luas lahan  $\pm 35$ Ha, sedangkan pengembangan dan perluasan kota akan direncanakan dilahan Perkebunan PTPN III Tanah Raja dengan luas lahan  $\pm 100$ Ha yang berlokasi diperbatasan Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah dan Desa Matapao Kecamatan Teluk Mengkudu. Selain itu juga akan dibangun TPA dengan sistem *Sanitary Landfill* atau *Controll Landfill* di Kecamatan Perbaungan dan Kecamatan Sei Rampah, serta TPA Regional di Kecamatan Serba Jadi. Melihat dampak yang akan ditimbulkan atas pembangunan tersebut, maka perlu dilakukan kajian untuk mendesign pembangunan tersebut sehingga diharapkan dapat meminimalisasikan dampak akibat pembangunan tersebut dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Demikian halnya dalam pembangunan ruang terbuka hijau, perlu dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan peruntukannya.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Hasil identifikasi isu-isu berdasarkan permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, Renstra, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Secara garis besar isu-isu strategis dimaksud adalah:

- a. Munculnya konsep ekonomi berkelanjutan ataupun pembangunan berkelanjutan tidak lain didasari oleh berbagai dampak yang telah dimunculkan terhadap lingkungan akibat berbagai aktivitas manusia, yang salah satunya akibat aktivitas industri. Aktivitas industri tidak hanya



mengakibatkan perubahan iklim, tetapi juga menimbulkan kerusakan dan pencemaran pada air, tanah dan udara.

Dari data tahun 2015, terdapat 196 aktivitas industri di Kabupaten Serdang Bedagai. Aktivitas industri tidak hanya mengakibatkan perubahan iklim, tetapi juga menimbulkan kerusakan dan pencemaran pada air, tanah dan udara. Untuk itu sangat perlu dilakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap dampak dari aktivitas industri tersebut.

- b. Masalah persampahan juga menjadi isu strategis yang harus segera ditangani. Pertumbuhan penduduk yang tinggi memberikan kontribusi terhadap masalah pengelolaan limbah yang salah satunya adalah masalah sampah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Tingginya jumlah penduduk berkorelasi positif dengan jumlah sampah yang diproduksi. Sampah ini muncul dalam bentuk yang beraneka ragam, dari yang bersifat alami hingga hasil yang diciptakan manusia. Sumber munculnya sampah juga beragam, berasal dari pemukiman, tempat umum, perkantoran, jalan raya, kawasan industri, lahan pertanian dan area penambangan.

Pada masyarakat tradisional, upaya mengatasi sampah dilakukan dengan cara tradisional juga, yaitu dengan mengumpulkan, mengubur, atau membakar sampah. Tetapi sebagian masyarakat juga membuang sampah ke tepian sungai atau ke badan sungai. Hal ini berpengaruh buruk terhadap ekosistem sungai, sektor pertanian, perikanan, suplai air bersih dan air baku air minum serta fungsi sungai sebagai sistem drainase dan pengendali banjir.

- c. Pemanfaatan bahan galian C sebagai bahan material dasar sangat penting untuk mendukung pembangunan fisik di Kabupaten Serdang Bedagai. Tingkat kecepatan eksploitasi dan penggunaan material ini telah mengakibatkan beberapa permasalahan kerusakan lingkungan hidup, di mana belum adanya ketaatan akan praktek-praktek pengelolaan yang bijak dan kurangnya tindakan rehabilitasi pasca penambangan oleh para pelaku kegiatan. Kerusakan lingkungan karena penambangan dan pengerukan bahan galian C sebagian besar diakibatkan dari kurangnya mempertimbangkan masalah-masalah lingkungan dalam perencanaan, pengoperasian dan perlakuan perbaikan pasca penambangan. Kerusakan lingkungan dapat diakibatkan oleh operasi kecil, besar dan mekanisasi penambangan atau oleh dampak kumulatif dari operasi kecil yang dilakukan secara terus menerus.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam penyusunan strategi dan kebijakan dalam pencapaian sasaran yang akan memberikan arahan bagi pelaksanaan pembangunan setiap urusan pemerintahan dalam mendukung visi dan misi. Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, untuk mendukung pencapaiannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang lingkungan hidup.

Sasaran:

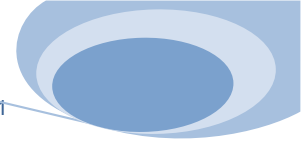
1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup.
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat.

Tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup disajikan dalam Tabel 4.1.



**Tabel 4.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Periode 2015	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun ke-				Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pada Tahun ke-				Target Kinerja Akhir Periode RPJMD 2021
					2016		2017		Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi					
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		42%	42.44%	45%	60%	50%	51,2%	52,4%	53,6%	53,6%
		Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		42%	42.44%	45%	60%	50%	51,2%	52,4%	53,6%	53,6%
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Bidang Lingkungan Hidup		Indeks Kepuasan Masyarakat		50%	34.50	63%	34.50%	65%	67%	70%	73%	73%
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		50%	54,31%	63%	34.50%	65%	67%	70%	73%	73%



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah cara atau pola untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif serta lebih bersifat *grand design*, yang dirancang untuk merespon kondisi, prospek dan isu strategis yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor penting dalam perencanaan stratejik, yaitu merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumberdaya, kondisi lingkungan yang dihadapi. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi instansi pemerintah untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi yang disusun diharapkan mampu memberikan solusi terhadap masalah yang diperkirakan akan timbul pada waktu mendatang

Strategi yang ditetapkan dalam dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD yaitu:

- 1) Melakukan tindakan antisipasi atas kerusakan lingkungan.
- 2) Melakukan pengujian dan pengukuran atas tingkat pencemaran dan kerusakan.
- 3) Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
- 4) Menyediakan sarana dan prasarana pendukung.
- 5) Melakukan penataan dan penegakan hukum bidang lingkungan.

Sedangkan arah kebijakan yang direncanakan dalam mendukung strategi yang ditetapkan yaitu:

Strategi 1 : Melakukan tindakan antisipasi atas kerusakan lingkungan.

Strategi ditempuh dengan kebijakan:

- 1) Melakukan konservasi dan tindakan pencegahan kerusakan atas sumber daya.

Strategi 2 : Melakukan pengujian, pengukuran dan inventarisasi atas kualitas lingkungan

Strategi ditempuh dengan kebijakan:

- 1) Penerapan berbagai instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- 2) Pengembangan data dan informasi serta penguatan jejaring informasi tentang lingkungan.
- 3) Pengembangan laboratorium lingkungan hidup.

Strategi 3 : Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan



Strategi ditempuh dengan kebijakan:

- 1) Pengembangan potensi masyarakat dan pelajar di bidang lingkungan hidup melalui sosialisasi dan pembinaan.

Strategi 4 : Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah dan limbah

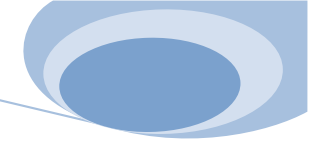
Strategi ditempuh dengan kebijakan:

- 1) Peningkatan pemahaman teknologi dan informasi persampahan.
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana persampahan dan tinja.

Strategi 5 : Melakukan penataan dan penegakan hukum bidang lingkungan

Strategi ditempuh dengan kebijakan:

- 1) Pelayanan atas kasus-kasus lingkungan.
- 2) Pengawasan ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap kebijakan lingkungan.



**Tabel 5.1**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

<b>Visi</b>	<b>Menjadikan Kabupaten Serdang Bedagai yang Unggul, Inovatif, dan Berkelanjutan</b>			
<b>Misi Keempat</b>	Memantapkan sarana dan prasarana dalam mendukung sektor potensial menjadi sektor unggulan daerah yang memiliki daya saing			
<b>Sasaran Strategis ke 3</b>	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Melakukan tindakan antisipasi atas kerusakan lingkungan	Melakukan konservasi dan tindakan pencegahan kerusakan atas sumber daya alam
			Melakukan pengujian dan pengukuran dan inventarisasi atas kualitas lingkungan	Penerapan berbagai instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
				Pengembangan data dan informasi serta penguatan jejaring informasi tentang lingkungan
			Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Pengembangan laboratorium lingkungan hidup
Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Bidang Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah dan limbah	Peningkatan pemahaman teknologi dan informasi persampahan
				Penyediaan sarana dan prasarana persampahan dan tinja
			Melakukan penataan dan penegakan hukum bidang lingkungan	Pelayanan atas kasus-kasus lingkungan
				Meningkatkan pengawasan ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap kebijakan lingkungan





## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

Sejalan dengan pencapaian visi, misi, sasaran dan arah kebijakan, maka perlu ditentukan rencana program dan kegiatan serta pagu indikatif yang direncanakan.

Program yang direncanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan terdiri atas 7 (tujuh) program urusan wajib Lingkungan Hidup yaitu:

1. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
6. Program Penegakan Hukum Lingkungan
7. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Dari masing-masing program, dilaksanakan beberapa kegiatan dengan pagu indikatif masing-masing program dan kegiatan sebagaimana terlampir pada lampiran I.



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**

Definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (BPKP, 2000). Sementara menurut Lohman (2003), indikator kinerja (*performance indicators*) adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

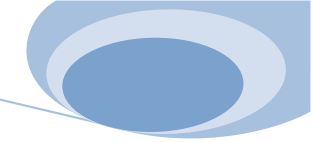
Indikator kinerja (*performance indicators*) sering disamakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*). Namun sebenarnya, meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi.

Sesuai dengan RPJMD 2016-2021, maka indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dijabarkan dalam tabel berikut:

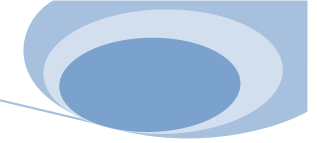


**Tabel 7.1**  
**INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2015		Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
		Besaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	40,35	%	42	45	50	51,2	52,4	53,6	53,6	Dinas LH
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	%	50	63	65	67	70	73	73	Dinas LH
3.	Persentase Tutupan Lahan/Hutan	2	%	2	2	2	2,5	3	3,5	3,5	Dinas LH
4.	Indeks Kualitas Air	65,1	%	68,65	73	82	83,75	85,5	87	87	Dinas LH
5.	Indeks Kualitas Udara	66,75	%	68,70	74,35	82	83,75	85,5	87	87	Dinas LH
6.	Persentase Kendaraan yang Lulus Uji Emisi	NA	%	-	50	55	-	-	-	55	Dinas LH
7.	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup yang Didapat	1	Penghargaan	2	3	2	3	3	4	4	Dinas LH
8.	Persentase Volume Sampah yang Terkurangi Melalui 3R	NA	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,5	Dinas LH
9.	Persentase Timbunan Sampah yang Ditangani	NA	%	-	43	45	45	45	45	45	Dinas LH

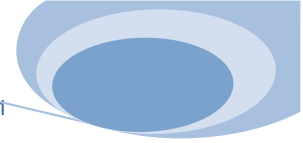


10.	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan	100	%	-	-	100	100	100	100	100	Dinas LH
11.	Ranperda Pengelolaan Lingkungan Hidup	NA	Ranperda	-	-	2	-	1	0	3	Dinas LH



**Tabel 7.2**  
**Formulasi IKU**

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase (%)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	$(\text{Indeks Pencemaran Air} \times 30\%) + (\text{Indeks Pencemaran Udara} \times 30\%) + (\text{Indeks Tutupan Lahan} \times 40\%)$	Hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan	Hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan di tahun berjalan
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase (%)	Perlu diketahui Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan di Bidang Lingkungan Hidup	Survei Kepuasan Masyarakat	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat / Penilaian Ombudsman	Hasil Survei atas Pelayanan Urusan Lingkungan dan Pelayanan Persampahan di Kabupaten Serdang Bedagai



## **BAB VIII PENUTUP**

### **8.1. Pedoman Transisi**

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Renja setelah Renstra Perubahan berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan pendidikan, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

1. Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2021

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2019 s.d. 2021 mengacu dan berpedoman pada Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 ini.

2. Renja Dinas Tahun 2022

Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 berpedoman dan mengacu pada Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021, Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021, Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2025 dan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025 serta Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2021-2025.

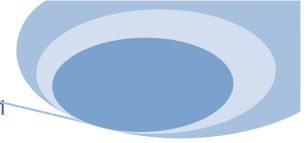
Selain itu dapat juga mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023, Renstra K/L, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023, dan RPJMN Tahun 2020-2024.

Renja Tahun 2022 harus menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2025. Selanjutnya, Renja dimaksud digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022.

### **8.2. Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan Perubahan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program dan kegiatan, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan Perubahan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021, dan



selanjutnya Perubahan Renstra menjadi dasar pedoman penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup. Dalam hal pelaksanaan Perubahan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan yang disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, Perubahan Renstra berpedoman dan mengikuti Perubahan RPJMD;

2. Perubahan Renstra selanjutnya dijabarkan dalam Renja. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berpedoman pada Perubahan Renstra.
3. Program/Kegiatan baru beserta indikator kinerja dan pagu indikatif diselaraskan dengan program/kegiatan pada Tahun 2016, 2017 dan 2018 beserta capaian indikator kinerja.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Perubahan Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Perubahan Renstra secara berkala;
5. Perubahan Renstra dapat berjalan manakala mendapat dukungan dari seluruh jajaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai target indikator yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya.

# LAMPIRAN I

## Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Targ et	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100.00%	100.00%	439801	100.00%	1098581	100.00%	688000	100.00%	544320	100.00%	620000	100.00%	668000			Dinas Lingkun gan Hidup
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Tenaga Kontrak Jasa Surat Menyurat yang Disediakan	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0	3 Orang	0	3 Orang	0	3 Orang	0	3 Orang	0	3 Or ang	0	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Jenis Jasa Surat Menyurat Setiap Bulannya	2 Jenis	2 Jenis	4303,2	2 Jenis	3331,2	2 Jenis	61100	2 Jenis	54162,01	2 Jenis	66000	2 Jenis	68000	2 Je nis	256897	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Jasa yang Disediakan	2 Jenis	2 Jenis	6481,5	2 Jenis	5857,258	1 Jenis	3000	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Je nis	15338,758	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	12 Jenis	2 Jenis	9413,8	3 Jenis	156485,865	3 Jenis	40500	1 Jenis	33033	1 Jenis	60000	1 Jenis	100000	11 J enis	399432,665	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara Setiap Bulannya	2 Unit	2 unit	104526,2	9 Unit	546486,675	1 Unit	71100	1 Unit	82531,25	1 Unit	85000	1 Unit	85000	9 Uni t	974644,125	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah Tenaga Kontrak/Supir yang Disediakan	2 Orang	2 Orang	0	2 Orang	0	1 Orang	0	1 Orang	0	1 Orang	0	1 Orang	0	2 Or ang	0	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jenis Penyediaan Kebersihan Kantor	2 Jenis	2 Jenis	92993	2 Jenis	95996,9	2 Jenis	99600	2 Jenis	106163,65	2 Jenis	120000	2 Jenis	120000	2 Je nis	634753,55	Dinas Lingkungan Hidup



Program dan Kegiatan an	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	
	Jumlah Tenaga Kontrak Jasa Kebersihan Kantor yang Disediakan	0 Orang	5 Orang	0	5 Orang	0	5 Orang	0	5 Orang	0	5 Orang	0	5 Orang	0	5 Or ang	0	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan Kantor yang Diperbaiki	15 unit	15 unit	23700	15 unit	35875	20 Unit	30000	20 unit	21994,09	20 Unit	24000	20 Unit	25000	110 Unit	160569,09	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan ATK setiap Bulannya	100%	100%	25199,8	100%	35998,7	100%	30000	100%	32417,7	100%	35500	100%	35500	100%	194616,2	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Setiap Bulannya	100%	100%	15571,25	100%	35275,4	100%	26800	100%	20506,5	100%	22000	100%	25000	100%	145153,15	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Listrik, dan Penerangan Setiap Bulannya	100%	100%	2985,5	100%	5999,55	100%	60400	100%	3175,75	100%	3500	100%	3500	100%	79560,8	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan/Buku yang Disediakan Setiap Bulannya	5 Jenis	10 Jenis	12000	10 Jenis	12000	10 Jenis	12000	10 Jenis	11880	10 Jenis	12000	10 Jenis	12000	60 J enis	71880	Dinas Lingkungan Hidup
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yang Diikuti	100%	100%	103527,095	100%	129949,6	100%	225900	100%	150350	100%	160000	100%	160000	100%	929726,7	Dinas Lingkungan Hidup
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah yang Diikuti	100%	100%	39100	100%	35325	100%	27600	100%	22050	100%	25000	100%	26000	100%	175075	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan jasa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pejabat Pengadaan yang Disediakan	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	5 Orang	6056,05	5 Orang	7000	5 Orang	8000	5 Or ang	21056,05	Dinas Lingkungan Hidup

Program dan Kegiatan an	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100.00%	-	-	60.00%	536779	-	-	-	-	-	-	70.00%	200000			Dinas Lingkun gan Hidup
pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan	2 unit Kendar aan Dinas Ro da 4	0 Unit	0	5 Unit	490051	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	5 Uni t	4900 51	Dinas Lingkungan Hidup
Pembangunan Gedung Kantor	Bangunan Kantor yang Dibangun	0 Gudang	0 Gudan g	0	1 Gudan g	12000	0 Gudan g	0	0 Gudan g	0	0 Gudan g	0	0 Gudan g	0	1 Gu dang	1200 0	Dinas Lingkungan Hidup
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Gedung	0 Gedun g	0	1 Gedun g	34728	0 Gedun g	0	0 Gedun g	0	0 Gedun g	0	1 Gedun g	200000	1 Ge dung	2347 28	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis dan fungsional	NA	-	-	6,00%	22500	12,00%	26400	-	-	14,00%	30000	16,00%	15000			Dinas Lingkun gan Hidup
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat	12 Orang	0 Orang	0	5 Orang	22500	4 Orang	26400	0 Orang	0	2 Orang	30000	1 Orang	15000	12 O rang	9390 0	Dinas Lingkungan Hidup
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan (10 Laporan)	100.00%	100.00%	31487	100.00%	27949	100.00%	13750	-	-	-	-	-	-			Dinas Lingkun gan Hidup
Operasional SAKIP	Jumlah Laporan Perencanaan Kegiatan dan Keuangan yang Dilaksanakan	8 Laporan	8 Lapora n	13315, 5	10 Lapor an	14950	10 Lapor an	13750	0 Lapora n	0	0 Lapora n	0	0 Lapora n	0	28 L apor an	4201 5,5	Dinas Lingkungan Hidup
Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2016-2021	Dokumen RENSTRA SKPD	1 Dokumen	1 Doku men	10764	0 Doku men	0	0 Doku men	0	0 Doku men	0	0 Doku men	0	0 Dokum en	0	1 Do kum en	1076 4	Dinas Lingkungan Hidup

Program dan Kegiatan an	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	
Pengelolaan Data Terpadu SKPD	Dokumen Data Terpadu SKPD	1 Dokumen	1 Doku men	7407,5	1 Doku men	12999,3	0 Doku men	0	0 Doku men	0	0 Doku men	0	0 Dokum en	0	2 Do kum en	2040 6,8	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yang berkurang melalui 3R	NA	0,5%	905730	0,5%	1753153	0,5%	3600712,5	0,5%	3176440	0,5%	4100000	0,5%	4261000			Dinas Lingkun gan Hidup
	Persentase Timbulan sampah yang ditangani	NA	NA	-	43,00%	-	45,00%	-	45,00%	-	45,00%	-	45,00%	-			
Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Jumlah Jenis Pengelolaan Sampah yang Disediakan	NA	1 Jenis	884130	0 Jenis	0	2 Jenis	715000	0 Jenis	0	1 Jenis	100000	2 Jenis	100000	7 Je nis	1799 130	Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah Kendaraan Operasional yang Dipelihara	NA	0 Unit	0	9 Unit	172702 3,436	9 Unit	2860600	10 Unit	315341 8,12	11 Unit	3902292	12 Unit	4044891	12 U nit	1568 822 4,55 6	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah Tenaga Kebersihan yang Tersedia	NA	0 Orang	0	50 Oran g	0	61 Oran g	0	61 Oran g	0	61 Oran g	0	76 Oran g	0	76 O rang	0	Dinas Lingkungan Hidup
Pelatihan Teknologi Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pelatihan	45 Orang	100 Ora ng	21600	100 Ora ng	26130	100 Ora ng	18837,5	100 Ora ng	7445,17	100 Ora ng	24594,5	100 Ora ng	31973	600 Oran g	1305 80,1 7	Dinas Lingkungan Hidup
Monitoring dan Evaluasi Limbah B3	Jumlah Usaha yang Dilakukan Pemantauan	NA	0 Usaha	0	0 Usaha	0	40 Usah a	6275	35 Usah a	15577	35 Usah a	20113,5	35 Usah a	24136,2	145 Usah a	6610 1,7	Dinas Lingkungan Hidup
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPAD-S) di Daerah Perkotaan dan/atau Perdesaan	Jenis Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diadakan	NA	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	1 Jenis	53000	1 Jenis	60000	2 Je nis	1130 00	Dinas Lingkungan Hidup

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Targ et	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	NA	68,65	233805	73,00	319164	82,00	229270	83,75	1001354	85,50	630000	87,00	680000			Dinas Lingku ngan Hidup
	Indeks Kualitas Udara	NA	68,70	-	74,35	-	82,00	-	83,75	-	85,50	-	87,00	-			
Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan	50 Laporan	30 Lapo ran	72078, 595	30 Lapo ran	144644, 1	30 Lapo ran	48550	30 Lapo ran	58003,6 4	40 Lapo ran	60000	40 Lapo ran	65000	200 Lapo ran	4482 76,3 35	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah Tenaga Kontrak yang Tersedia	3 Orang	3 Orang	0	3 Orang	0	2 Orang	0	2 Orang	0	2 Orang	0	2 Orang	0	3 Or ang	0	Dinas Lingkungan Hidup
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Usaha yang Diawasi Izin Lingkungannya	35 Usaha	30 Usah a	7220	40 Usah a	22000	0 Usaha	0	0 Usaha	0	0 Usaha	0	0 Usaha	0	70 U saha	2922 0	Dinas Lingkungan Hidup
Penyelesaian Sengketa/Pengaduan Kasus Lingkungan	Jumlah Kasus Lingkungan yang Ditangani	12 Kasus	5 Kasus	5880	10 Kasu s	2255	0 Kasus	0	0 Kasus	0	0 Kasus	0	0 Kasus	0	15 K asus	8135	Dinas Lingkungan Hidup
Penilaian Masyarakat Peduli Lingkungan dalam Rangka Peringatan Hari Lingkungan dan Hari Bumi	Kategori Perlombaan Lingkungan Hidup	5 Kategori	8 Kateg ori	115741	8 Kateg ori	108837, 5	0 Kateg ori	0	0 Kateg ori	0	0 Kateg ori	0	0 Katego ri	0	16 K ateg ori	2245 78,5	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Laboratorium yang Disediakan	1 Jenis	0 Jenis	0	10 Jenis	37927,8 9	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	145000	2 Jenis	150000	14 J enis	3329 27,8 9	Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan Kinerja Laboratorium	Parameter uji untuk akreditasi lab	NA	0 Param eter	32886	0 Param ater	3500	0 Param eter	0	5 Param eter	87500	5 Param eter	90000	5 Param eter	90000	15 P aram eter	3038 86	Dinas Lingkungan Hidup

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	
Operasional UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	Operasional UPTD Laboratorium	0 UPTD	0 UPTD	0	0 UPTD	0	1 UPTD	180720	1 UPTD	173361,52	1 UPTD	195000	1 UPTD	200000	1 UP TD	749081,52	Dinas Lingkungan Hidup
	Tenaga Analis Laboratorium yang Tersedia	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0	2 Orang	0	2 Orang	0	2 Orang	0	2 Orang	0	2 Or ang	0	Dinas Lingkungan Hidup
Pengadaan Peralatan Laboratorium Untuk Uji Kualitas Air	Jenis Peralatan Lab Uji Kualitas Air yang Diadakan	0 Jenis	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	585186,67	1 Jenis	131500	1 Jenis	131000	4 Je nis	847686,7	Dinas Lingkungan Hidup
Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Uji Emisi	NA	0 Kenda raan	0	0 Kenda raan	0	0 Kenda raan	0	100 Ken daraan	6581,67	100 Ken daraan	8500	100 Ken daraan	9000	300 Kend araa n	24081,67	Dinas Lingkungan Hidup
Inventarisasi GRK	Dokumen Data Inventarisasi GRK	0 Dokumen	0 Doku men	0	0 Doku men	0	0 Doku men	0	0 Doku men	0	0 Doku men	0	1 Dokum en	35000	1 Do kum en	35000	Dinas Lingkungan Hidup
Penyusunan Dokumen Mutu Laboratorium	Dokumen Mutu Laboratorium	0 Dokumen	0 Doku men	0	0 Doku men	0	0 Doku men	0	1 Doku men	90720,5	0 Doku men	0	0 Dokum en	0	1 Do kum en	90720,5	Dinas Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase tutupan hutan/lahan/	NA	2,00	439895	2,00	107160	2,00	86600	2,50	77880	3,00	210000	3,50	171000			Dinas Lingkun gan Hidup
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Lahan yang Direhabilitasi	1 Lokasi	1 Lokasi	381420	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	1 Lokasi	24000	2 Lo kasi	405420	Dinas Lingkungan Hidup
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA	Jumlah Usaha yang Diawasi	30 Usaha	20 Usah a	20300	25 Usah a	48900	0 Usaha	0	0 Usaha	0	0 Usaha	0	0 Usaha	0	45 U saha	69200	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah Tenaga Pengawasan yang Disediakan	0 Orang	0 Orang	0	2 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	2 Or ang	0	Dinas Lingkungan Hidup

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	
Pemantauan Tingkat Kerusakan atas Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Jumlah usaha yang dipantau	NA	0 Usaha	0	0 Usaha	0	30 Usah a	7700	35 Usah a	7325,8	35 Usah a	50000	35 Usah a	35000	150 Usah a	1000 25,8	Dinas Lingkungan Hidup
Antisipasi Perubahan Iklim melalui Pembinaan dan Penilaian Program Kampung Iklim	Jumlah Lokasi Pembinaan dan Penilaian Kampung Iklim	NA	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	2 Lokasi	15900	1 Lokasi	9772,85	2 Lokasi	60000	2 Lokasi	47000	7 Lo kasi	1326 72,8 5	Dinas Lingkungan Hidup
Identifikasi Kerusakan Hutan dan Lahan untuk Produksi Biomassa	Jumlah Lokasi yang Dilakukan Identifikasi Kerusakan Hutan dan Lahan untuk Produksi Biomassa	3 Lokasi	1 Lokasi	38175	2 Lokasi	38825	2 Lokasi	34925	2 Lokasi	33674,1 9	2 Lokasi	40000	2 Lokasi	35000	11 L okasi	2205 99,1 9	Dinas Lingkungan Hidup
Pemeliharaan Hutan Kota	Lokasi Hutan Kota yang Dipelihara	NA	0 Lokasi	0	1 Lokasi	19435	1 Lokasi	28075	1 Lokasi	27107,1 6	1 Lokasi	60000	1 Lokasi	30000	1 Lo kasi	1646 17,1 6	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang didapat	1	2	139172	3	272648	2	353127,5	3	366163	3	250000	4	415000			Dinas Lingkun gan Hidup
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Kategori Lomba Pendidikan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten	2 Kategori	3 Kateg ori	36040	4 Kateg ori	38728	4 Kateg ori	24990	4 Kateg ori	26394,1 1	4 Kateg ori	30000	4 Katego ri	30000	4 Kat egori	1861 52,1 1	Dinas Lingkungan Hidup
Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah	Jejaring Informasi Lingkungan yang Terbentuk	NA	0 Web	0	1 Web	44275	0 Web	0	0 Web	0	0 Web	0	0 Web	0	1 We b	4427 5	Dinas Lingkungan Hidup
	Keikutsertaan dalam Pameran/Event	NA	0 Pamer an	0	0 Pamer an	0	3 Pamer an	31000	3 Pamer an	36949,9	2 Pamer an	60000	3 Pamer an	55000	3 Pa mera n	1829 49,9	Dinas Lingkungan Hidup

Program dan Kegiatan an	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	
Pembinaan Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup (ADIWIYATA)	Jumlah Sekolah yang Dibina	13 Sekolah	10 Sekol ah	78332, 5	25 Sekol ah	156095	20 Sekol ah	111512,5	25 Sekol ah	97996,1 5	20 Sekol ah	100000	20 Sekol ah	100000	125 Seko lah	6439 36,1 5	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah Tenaga Kontrak yang Tersedia	0	0	0	2 Orang	0	2 Orang	0	3 Orang	0	3 Orang	0	3 Orang	0	3 Or ang	0	Dinas Lingkungan Hidup
Penilaian Masyarakat Peduli Lingkungan dalam Rangka Peringatan Hari Lingkungan dan Hari Bumi	Kategori Perlombaan Mengenai Wawasan Lingkungan Hidup	5 Kategori	0 Kateg ori	0	0 Kateg ori	0	3 Kateg ori	53225	3 Kateg ori	23692,0 9	3 Kateg ori	30000	4 Katego ri	30000	4 Kat egori	1369 17,0 9	Dinas Lingkungan Hidup
Penyusunan dokumen rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup	Rencana PPLH	NA	0 Renca na	0	0 Renca na	0	0 Renca na	0	1 Renca na	160379, 02	0 Renca na	0	0 Renca na	0	1 Re ncan a	1603 79,0 2	Dinas Lingkungan Hidup
Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Jumlah Kecamatan Penentuan Daya Dukung Daya Tampung	NA	0 Kecam atan	0	0 Kecam atan	0	17 Keca matan	132400	0 Kecam atan	0	0 Kecam atan	0	0 Kecam atan	0	17 K eca mata n	1324 00	Dinas Lingkungan Hidup
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	NA	0 Kajian	0	0 Kajian	0	0 Kajian	0	0 Kajian	0	0 Kajian	0	1 Kajian	170000	1 Kaj ian	1700 00	Dinas Lingkungan Hidup
Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Laporan Informasi Lingkungan yang Tersedia	3 Dokumen	2 Doku men	24800	2 Doku men	33050	0 Doku men	0	2 Doku men	20751,7 3	2 Doku men	30000	2 Dokum en	30000	10 D oku men	1391 01,7 3	Dinas Lingkungan Hidup
Program peningkatan pengendalian polusi	Persentase jumlah kendaraan yang lulus uji emisi	NA	-	-	50,00%	13175	55,00%	11050	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkun gan Hidup

Program dan Kegiatan an	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	
Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Uji Emisi	NA	0 Kenda raan	0	100 Ken daraan	13175	100 Ken daraan	11050	0 Kenda raan	0	0 Kenda raan	0	0 Kendar aan	0	200 Kend araa n	2422 5	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penegakan Hukum Lingkungan	Persentase penyelesaian kasus lingkungan	100%	0	0	0	0	100,00%	36650	100,00%	48822	100,00%	80000	100,00%	80000			Dinas Lingkun gan Hidup
Penyelesaian Sengketa/Pengaduan Kasus Lingkungan	Jumlah Kasus Lingkungan yang Ditangani	12 Kasus	0 Kasus	0	0 Kasus	0	10 Kasu s	23275	10 Kasu s	30640	10 Kasu s	45000	10 Kasu s	45000	40 K asus	1439 15	Dinas Lingkungan Hidup
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Usaha yang Diawasi Izin Lingkungannya	35 Usaha	0 Usaha	0	0 Usaha	0	40 Usah a	13375	40 Usah a	18182	40 Usah a	35000	40 Usah a	35000	160 Usah a	1015 57	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ranperda pengelolaan lingkungan hidup	NA	-	-	-	-	2	137000	-	-	1	80000	-	-			Dinas Lingkun gan Hidup
Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Kab. Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	Rancangan Revisi Perda yang Disusun	0 Rancangan	0 Ranca ngan	0	0 Ranca ngan	0	1 Ranca ngan	72000	0 Ranca ngan	0	0 Ranca ngan	0	0 Ranca ngan	0	1 Ra ncan gan	7200 0	Dinas Lingkungan Hidup
Penyusunan Rancangan Perda tentang Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus	Rancangan Perda Retribusi Penyedotan Kasus yang Disusun	0 Rancangan	0 Ranca ngan	0	0 Ranca ngan	0	1 Ranca ngan	65000	0 Ranca ngan	0	0 Ranca ngan	0	0 Ranca ngan	0	1 Ra ncan gan	6500 0	Dinas Lingkungan Hidup
Penyusunan Rancangan Perda pada Dinas Lingkungan Hidup	Rancangan Perda	0 Rancangan	0 Ranca ngan	0	0 Ranca ngan	0	0 Ranca ngan	0	0 Ranca ngan	0	1 Ranca ngan	80000	0 Ranca ngan	0	1 Ra ncan gan	8000 0	Dinas Lingkungan Hidup